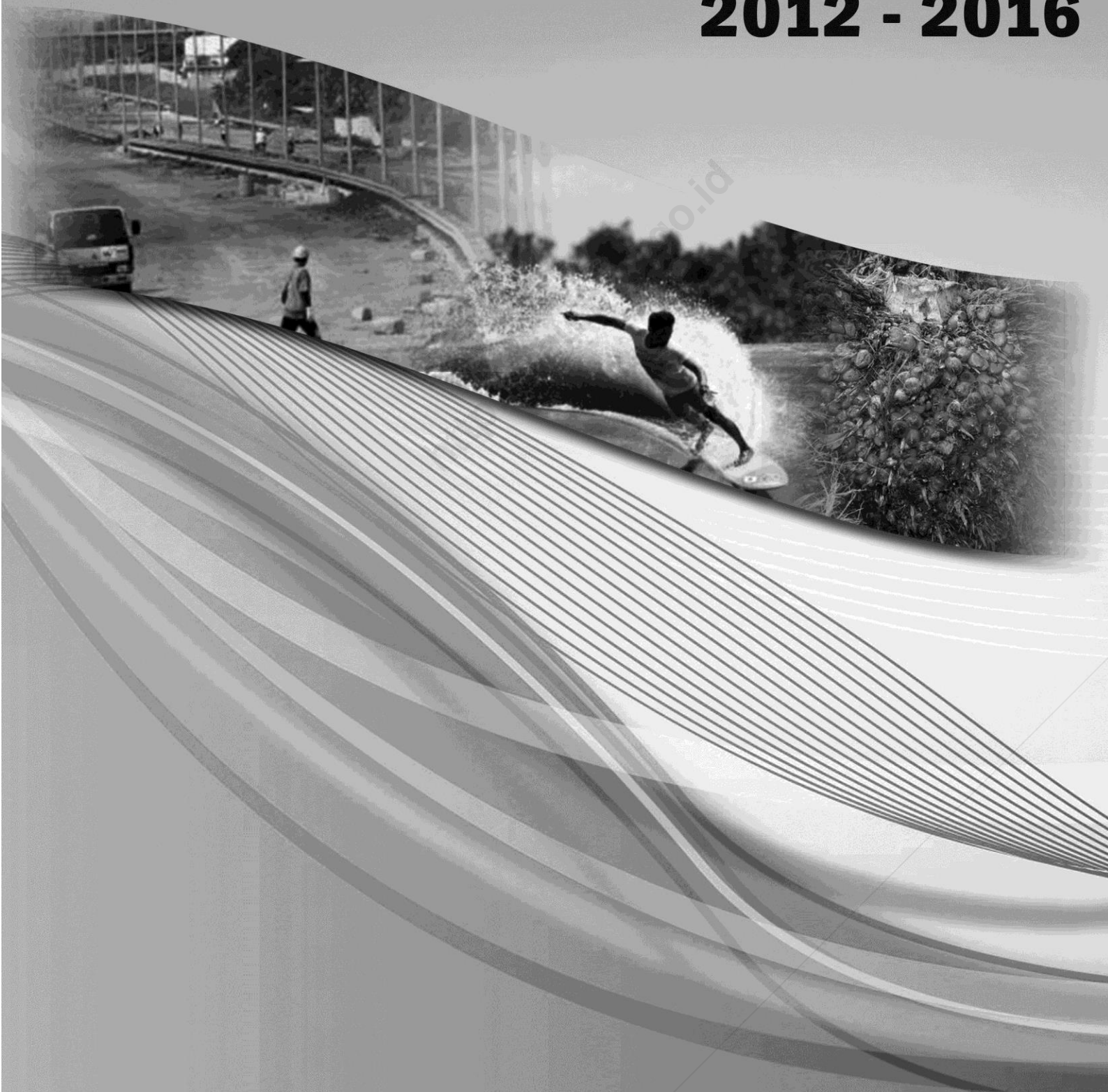


PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI RIAU MENURUT LAPANGAN USAHA 2012 - 2016



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI RIAU**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROVINSI RIAU
MENURUT LAPANGAN USAHA
2012 - 2016**



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROVINSI RIAU MENURUT LAPANGAN USAHA
2012 - 2016**

ISBN : 978-602-17820-7-1

Nomor Publikasi : 14550.1701

Katalog BPS Provinsi Riau : 9302021.14

Ukuran Buku : 21 cm x 28 cm

Jumlah Halaman : vii+82 halaman

Naskah
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh
Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Dicetak oleh
CV. MN Graphika

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Menurut Lapangan Usaha 2012-2016 ini merupakan kelanjutan dari publikasi tahun-tahun sebelumnya yang disusun oleh BPS Provinsi Riau secara periodik. Publikasi ini menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian Riau secara deskriptif dari sisi pendekatan produksi. Dalam publikasi ini juga ditampilkan tabel-tabel PDRB tahun 2012-2016 atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 dalam bentuk nilai nominal dan persentase.

Pada saat terbitnya publikasi ini, BPS Provinsi Riau juga menerbitkan publikasi yang sama dengan pendekatan pengeluaran. Kedua publikasi ini merupakan publikasi yang saling melengkapi untuk dapat menjelaskan kondisi PDRB di Provinsi Riau tahun 2012-2016 dari 2 sisi pendekatan.

Saran dan masukan dari pengguna data sangat diharapkan demi meningkatnya kualitas publikasi ini di masa mendatang. Kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan publikasi ini, diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Juli 2017
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Riau,



Aden Gultom

<http://riau.bps.go.id>



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
PENJELASAN TEKNIS	vi
I. PENJELASAN UMUM	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto	1
1.2 Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto	2
1.3 Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto	2
II. RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN.....	8
2.1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8
2.2 Pertambangan dan Penggalian	13
2.3 Industri Pengolahan	15
2.4 Pengadaan Listrik dan Gas	21
2.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	23
2.6 Konstruksi	24
2.7 Perdagangan Besar dan Eceran,Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	25
2.8 Transportasi dan Pergudangan.....	27
2.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.....	31
2.10 Informasi dan Komunikasi.....	32
2.11 Jasa Keuangan dan Asuransi.....	34
2.12 Real Estat.....	42
2.13 Jasa Perusahaan.....	42
2.14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	44
2.15 Jasa Pendidikan.....	45
2.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.....	45
2.17 Jasa Lainnya.....	46

III.	TINJAUAN EKONOMI PROVINSI RIAU	49
	3.1 Struktur Ekonomi	49
	3.2 Pertumbuhan Ekonomi	50
	3.3 PDRB Per Kapita	51
IV.	PERKEMBANGAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA	53
	4.1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	53
	4.2 Pertambangan dan Penggalian	54
	4.3 Industri Pengolahan	55
	4.4 Pengadaan Listrik dan Gas	56
	4.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	57
	4.6 Konstruksi	57
	4.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	57
	4.8 Transportasi dan Pergudangan.....	58
	4.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.....	59
	4.10 Informasi dan Komunikasi.....	60
	4.11 Jasa Keuangan dan Asuransi.....	60
	4.12 Real Estat.....	60
	4.13 Jasa Perusahaan.....	61
	4.14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	61
	4.15 Jasa Pendidikan.....	61
	4.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.....	61
	4.17 Jasa Lainnya.....	62

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB	5
Tabel 1.2	Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010	6
Tabel 1.3	Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010	7
Tabel 3.1	Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2012–2016	49
Tabel 3.2	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2012–2016	51
Tabel 3.3	PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp), 2012–2016	52
Tabel 4.1	Peranan Subkategori terhadap PDRB Kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian (persen), 2012–2016	54
Tabel 4.2	Peranan Subkategori terhadap PDRB Kategori Pertambangan dan Penggalan (persen), 2012–2016	54
Tabel 4.3	Peranan Subkategori terhadap PDRB Kategori Industri Pengolahan (persen), 2012–2016	55
Tabel 4.4	Peranan Subkategori terhadap PDRB Kategori Pengadaan Listrik dan Gas (persen), 2012–2016	57
Tabel 4.5	Peranan Subkategori terhadap PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (persen), 2012–2016	58
Tabel 4.6	Peranan Subkategori terhadap PDRB Kategori Transportasi dan Pergudangan (persen), 2012–2016	59
Tabel 4.7	Peranan Subkategori terhadap PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (persen), 2012–2016	59
Tabel 4.8	Peranan Subkategori terhadap PDRB Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi (persen), 2012–2016	60

<http://riau.bps.go.id>



DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Tabel 1	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2012–2016 (juta rupiah)	63
Tabel 2	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2012–2016 (juta rupiah)	65
Tabel 3	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2012–2016 (persen)	67
Tabel 4	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2012–2016 (persen)	69
Tabel 5	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2012–2016 (persen)	71
Tabel 6	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2012–2016 (persen)	73
Tabel 7	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (2010 = 100), 2012–2016	75
Tabel 8	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (2010 = 100), 2012–2016	77
Tabel 9	Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Menurut Lapangan Usaha, 2012–2016 (persen)	79
Tabel 10	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Menurut Lapangan Usaha (persen), 2012–2016	81

<http://riau.bps.go.id>



PENJELASAN TEKNIS

1. Penghitungan statistik neraca nasional yang digunakan dalam publikasi ini mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa yang dikenal sebagai “Sistem Neraca Nasional”. Namun, penerapan statistik neraca nasional tersebut telah disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi Indonesia.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.
3. Penyajian PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha yang mencakup kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.
4. Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu. Dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian.
5. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.
6. Harga berlaku adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tahun sedang berjalan.

-
7. Harga konstan adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tetap di satu tahun dasar.
 8. Tahun dasar adalah tahun terpilih sebagai referensi statistik, yang digunakan sebagai dasar penghitungan tahun-tahun yang lain. Dengan tahun dasar tersebut dapat digambarkan seri data dengan indikator rinci mengenai perubahan/pergerakan yang terjadi.

<http://riau.bps.go.id>

I. PENJELASAN UMUM

1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Perencanaan pembangunan ekonomi memerlukan berbagai macam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa-masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik pendapatan nasional/regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional, khususnya di bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah maupun swasta.

Apa yang Dimaksud dengan PDRB?

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil).

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

1.2 Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto

Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah :

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB dan PNRB per satu orang penduduk.
5. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

1.3 Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT).

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

Apa yang Dimaksud SNA 2008?

SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur *item* tertentu seperti PDRB.

SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas pelaku ekonomi dalam hal produksi, konsumsi dan akumulasi harta dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan Kerangka SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan dipahami.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB antara lain :

- Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi.
- Meningkatkan kualitas data PDRB.
- Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Pergeseran harga tahun dasar akan memberikan beberapa dampak antara lain :

- Meningkatkan nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah, menjadi menengah atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian.

-
- Merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi.
 - Menyebabkan perubahan pada input data untuk *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 Sebagai Tahun Dasar?

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut :

- Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil.
- Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru.
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun¹.
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008.
- Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index/PPI*).
- Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB Tahun Dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya dan 44 diantaranya merupakan revisi utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDRB tahun dasar 2010 diantaranya :

- Konsep dan cakupan: Perlakuan *Work-In Progress* (WIP) pada *Cultivated Biological Resources* (CBR)

Merupakan penyertaan pertumbuhan aset alam hasil budidaya manusia yang belum di panen sebagai bagian dari output lapangan usaha yang bersangkutan seperti nilai tegakan padi yang

¹ SNA1993, para 16.76: "*constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing*"

belum di panen, nilai sapi perah yang belum menghasilkan, nilai pohon kelapa sawit atau karet yang belum berbuah/dipanen.

- Metodologi : Perbaikan metode penghitungan output bank dari *Imputed Bank Services Charge* (IBSC) menjadi *Financial Intermediation Services Indirectly Measured* (FISIM).
- Valuasi : Nilai tambah lapangan usaha dinilai dengan Harga Dasar (*Basic Price*)
Merupakan harga keekonomian barang dan jasa ditingkat produsen sebelum adanya intervensi pemerintah seperti pajak dan subsidi atas produk. Valuasi ini hanya untuk penghitungan PDB, sedangkan PDRB menggunakan harga produsen.
- Klasifikasi :
Klasifikasi yang digunakan berdasarkan *Internasional Standard Classification* (ISIC rev.4) dan *Central Product Classification* (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua klasifikasi tersebut sebagai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2009 (KBLI 2009) dan Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia 2010 (KBKI 2010).

Perbandingan perubahan konsep dan metode dari SNA sebelumnya dan SNA 2008 antara lain dijelaskan pada Tabel 1.1.

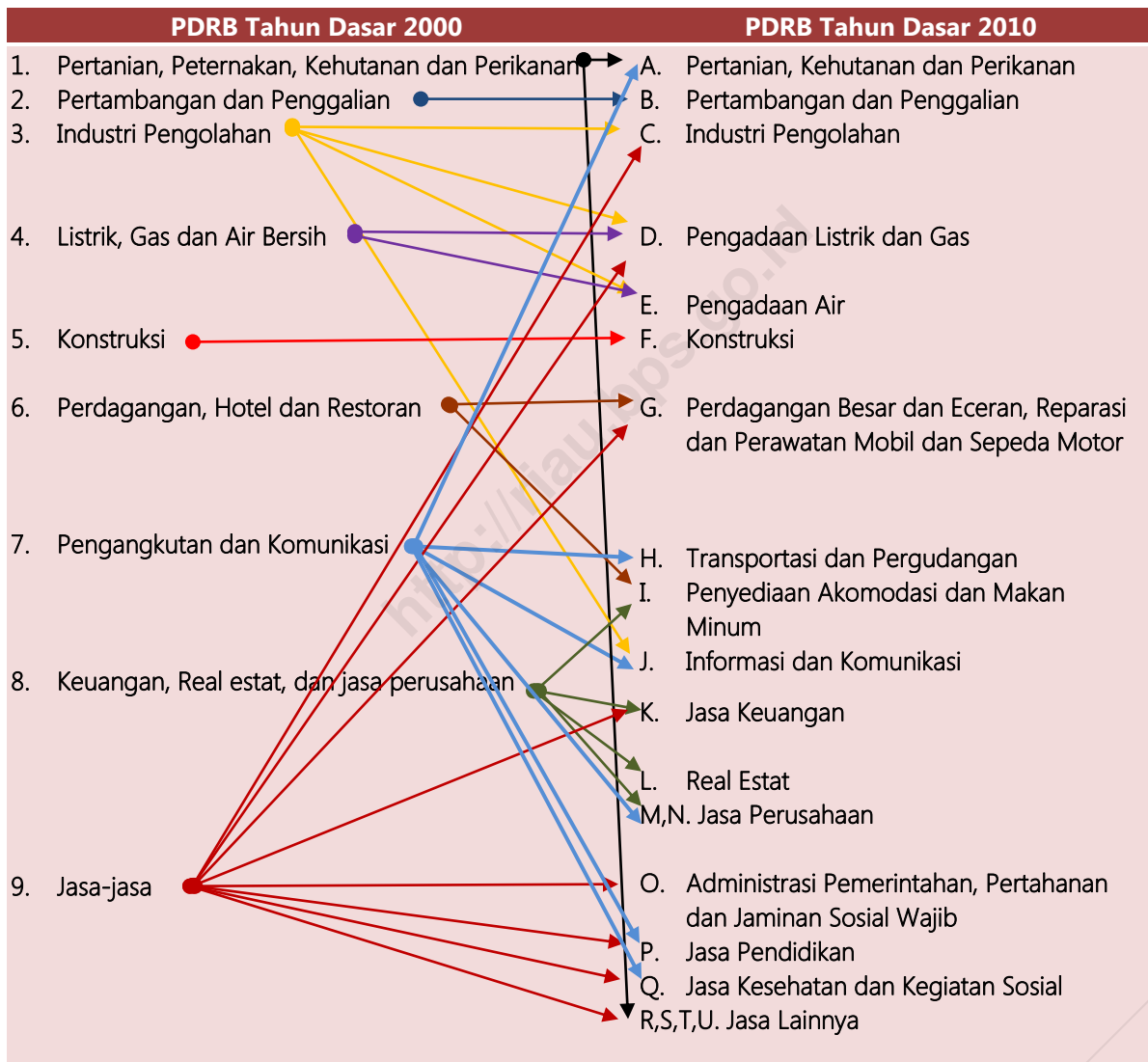
Tabel 1.1. Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB

Variabel	Konsep Lama	Konsep Baru
1. Output pertanian	Hanya mencakup output pada saat panen	Output saat panen ditambah nilai hewan dan tumbuhan yang belum menghasilkan
2. Metode penghitungan output bank komersial	Menggunakan metode <i>Imputed Bank Services Charge</i> (IBSC)	Menggunakan metode <i>Financial Intermediary Services Indirectly Measured</i> (FISIM)
3. Biaya eksplorasi mineral dan pembuatan produk original	Dicatat sebagai konsumsi antara	Dicatat sebagai output dan dikapitalisasi sebagai PMTB

Perubahan Klasifikasi dari PDRB Tahun Dasar 2000 ke PDRB Tahun Dasar 2010

Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan KBLI 2009. Perbandingan keduanya pada tingkat paling agregat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2. Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010



Sementara klasifikasi PDRB menurut pengeluaran tahun dasar 2010 secara garis besar tidak banyak mengalami perubahan seperti tabel berikut :

Tabel 1.3. Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000		PDRB Tahun Dasar 2010	
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	●	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	→
		2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	→
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	●	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	→
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto		4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	→
4. Perubahan Inventori		5. Perubahan Inventori	→
5. Ekspor		6. Ekspor	→
6. Impor		7. Impor	→

<http://riau.bps.go.id>

<http://riau.bps.go.id>



II. RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN

Uraian lapangan usaha yang disajikan dalam bab ini mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing kategori dan subkategori lapangan usaha, cara-cara perhitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, serta sumber datanya.

Uraian lapangan usaha yang disajikan dalam bab ini mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing kategori dan subkategori lapangan usaha, cara-cara perhitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, serta sumber datanya.

2.1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup segala pengusaha yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Pengusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan.

2.1.1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

Subkategori ini mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan hewan yang ditujukan untuk dijual.

2.1.1.1 Tanaman Pangan

Meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya, seperti talas, ganyong, irut, gembili, dll), serta tanaman serelia lainnya (sorgum/cantel, jawawut, jelai, gandum, dll). Keseluruhan komoditas di atas masuk ke dalam golongan tanaman semusim, dengan wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup kategori pertanian. Contoh wujud produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan antara lain : padi dalam wujud Gabah Kering Giling (GKG), jagung dalam wujud pipilan kering, dan ubi kayu dalam wujud umbi basah.

Data produksi padi dan palawija diperoleh dari Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi Riau dan Subdit Statistik Tanaman Pangan BPS. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman pangan dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman pangan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Tanaman Pangan BPS.

2.1.1.2 Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman hortikultura semusim dan tanaman hortikultura tahunan. Tanaman hortikultura semusim meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur pendek (kurang dari satu tahun) dan panennya dilakukan satu atau beberapa kali masa panen untuk satu kali penanaman. Sedangkan tanaman hortikultura tahunan meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali masa panen untuk satu kali penanaman. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman hortikultura meliputi kelompok komoditi sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias.

Data produksi komoditas hortikultura diperoleh dari Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi Riau dan Subdit Statistik Hortikultura BPS. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman hortikultura dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau dan Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman hortikultura diperoleh dari hasil Sensus Pertanian.

2.1.1.3 Tanaman Perkebunan

Tanaman perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan diantaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak,

wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dll), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dan sebagainya.

Data produksi komoditas perkebunan diperoleh dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman perkebunan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman perkebunan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian.

2.1.1.4 Peternakan

Peternakan mencakup semua usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan serta budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangbiakkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Golongan ini juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang menghasilkan produk berulang, misalnya untuk menghasilkan susu dan telur. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan adalah sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam bukan ras (buras), ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik manila, itik, telur ayam ras, telur ayam bukan ras, telur itik, susu segar, dsb.

Data produksi komoditas peternakan diperoleh dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS dan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok peternakan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan peternakan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Peternakan (Ternak Besar dan Kecil, Ternak Unggas, dan Sapi Perah) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Peternakan BPS.

2.1.1.5 Jasa Pertanian dan Perburuan

Kegiatan jasa pertanian dan perburuan meliputi kegiatan jasa pertanian, perburuan dan penangkapan satwa liar, serta penangkaran satwa liar. Kegiatan jasa pertanian adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak yang khusus

yang diberikan untuk menunjang kegiatan pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan). Dicakup juga dalam kegiatan jasa pertanian adalah penyewaan alat pertanian/hewan bersama operatornya dan resiko kegiatan jasa tersebut ditanggung oleh yang memberikan jasa.

Kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar mencakup usaha perburuan dan penangkapan satwa liar dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk usaha pengawetan dan penyamakan kulit dari furskin, reptil, dan kulit unggas hasil perburuan dan penangkapan. Termasuk perburuan dan penangkapan binatang dengan perangkap untuk umum, penangkapan binatang (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan, produksi kulit bulu binatang, reptil atau kulit burung dari kegiatan perburuan atau penangkapan. Sedangkan kegiatan penangkaran satwa liar mencakup usaha penangkaran, pembesaran, penelitian untuk pelestarian satwa liar, baik satwa liar darat dan satwa liar laut seperti mamalia laut, misalnya duyung, singa laut dan anjing laut.

Output jasa pertanian diperoleh dengan pendekatan imputasi dengan memperhatikan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output yang dihasilkan oleh suatu kegiatan pertanian pada periode tertentu. Output kegiatan pertanian diperoleh dari Subdit Neraca Barang BPS. Sedangkan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output diperoleh dari hasil Sensus Pertanian, Survei Struktur Ongkos Usaha Tani, dan Survei Perusahaan Peternakan yang dilakukan oleh BPS. Sedangkan untuk kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar diestimasi menggunakan pendapatan devisa dari penjualan satwa liar yang datanya diperoleh dari Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2.1.2 Kehutanan dan Penebangan Kayu

Subkategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk di sini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.

Data produksi kayu bulat dan hasil hutan lainnya berasal dari Perum Perhutani, Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Subdit Statistik Kehutanan BPS dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Data harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Kehutanan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan kehutanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Kehutanan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Kehutanan BPS.

2.1.3 Perikanan

Subkategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, *crustacea*, *mollusca*, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicakup juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

Data produksi komoditas perikanan diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok perikanan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan perikanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Perikanan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Perikanan BPS.

Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah melalui pendekatan produksi. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data produksi dan harga untuk masing-masing komoditi pertanian.

Menurut sifatnya, output dibedakan atas dua jenis, yaitu output utama dan output ikutan. Disamping itu, komoditi lainnya yang belum dicakup diperkirakan melalui besaran persentase pelengkap yang diperoleh dari berbagai survei khusus. Penghitungan output pada kategori ini tidak hanya mencakup output utama dan ikutan pada saat penen tetapi juga ditambahkan output yang

diadopsi dari implementasi SNA 2008. Untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas yang dapat diambil hasilnya berulang kali, outputnya juga mencakup biaya perawatan yang dikeluarkan selama periode tertentu yang dinamakan dengan *Cultivated Biological Resources (CBR)*. Sedangkan untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas semusim atau yang diambil hasilnya hanya sekali, outputnya juga mencakup biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di akhir periode dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di awal periode yang disebut sebagai *Work-In Progress (WIP)*. Sehingga total output pada kategori ini merupakan penjumlahan dari nilai output utama, output ikutan, dan CBR atau WIP ditambah dengan nilai pelengkapannya.

Nilai Tambah Bruto (NTB) suatu subkategori diperoleh dari penjumlahan NTB tiap-tiap kegiatan usaha yang menghasilkan komoditas tertentu. NTB ini didapat dari pengurangan nilai output atas harga dasar dengan seluruh pengeluaran konsumsi antara. Estimasi NTB atas dasar harga konstan 2010 menggunakan metode revaluasi, yaitu mengalikan produksi di tahun berjalan dengan harga pada tahun dasar (tahun 2010) untuk mengestimasi output konstan tahun berjalan.

2.2 Pertambangan dan Penggalian

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam Kategori Pertambangan dan Penggalian, dikelompokkan dalam empat subkategori, yaitu pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya.

2.2.1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi

Subkategori pertambangan migas dan panas bumi meliputi kegiatan produksi minyak bumi mentah, pertambangan dan pengambilan minyak dari serpihan minyak dan pasir minyak dan produksi gas alam serta pencarian cairan hidrokarbon. Subkategori ini juga mencakup kegiatan operasi dan/atau pengembangan lokasi penambangan minyak, gas alam, dan panas bumi.

Pendekatan penghitungan yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing periode penghitungan. Sedangkan NTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi.

Data produksi untuk pertambangan migas diperoleh dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Data harga/indikator harga juga diperoleh dari Ditjen Migas, ESDM, Statistik PLN, dan Indeks Harga Produsen (IHP) Gas dan Panas Bumi sebagai penggerak harga gas alam dan panas bumi setiap triwulan; data struktur biaya diperoleh dari Laporan Keuangan Perusahaan, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Statistik Pertambangan Migas BPS. Data harga minyak mentah menggunakan *Indonesia Crude Price (ICP)*, harga gas bumi pada tahun 2010 yang digerakkan berdasarkan IHP Gas dan Panas bumi. Harga uap panas bumi menggunakan harga panas bumi yang terdapat pada publikasi tahunan Statistik PLN dan digerakkan dengan IHP gas dan panas bumi untuk mendapatkan harga triwulanan.

2.2.2 Pertambangan Batubara dan Lignit

Pertambangan batubara mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batubara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous, baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan. Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta pemadatan meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batubara dari kumpulan tepung bara.

Pertambangan lignit mencakup penambangan di permukaan tanah termasuk penambangan dengan metode pencairan dan kegiatan lain untuk meningkatkan kualitas dan memudahkan pengangkutan dan penyimpanan.

Untuk memperoleh output batubara dan lignit digunakan metode pendekatan produksi. Untuk memperoleh NTB atas dasar harga berlaku dan konstan 2010 digunakan dengan cara yang sama seperti pada subkategori pertambangan migas yaitu revaluasi. Data produksi batubara diperoleh dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau; Harga Batubara Acuan (HBA) diperoleh dari Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM; Statistik Pertambangan Non Migas BPS serta beberapa data dari BPS Provinsi /Kabupaten/Kotamadya; Dinas Pendapatan Daerah.

2.2.3 Pertambangan Bijih Logam

Subkategori ini mencakup pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium, tembaga, timah, seng, timah hitam,

mangan, krom, nikel, kobalt dan lain-lain, termasuk bijih logam mulia lainnya. Kelompok bijih logam mulia lainnya mencakup pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya.

Beberapa jenis produknya antara lain pertambangan pasir besi dan bijih besi dan peningkatan mutu dan proses aglomerasi bijih besi, pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium (bauksit), tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel, kobalt dan lain-lain serta pertambangan bijih logam mulia, seperti emas, platina, perak dan logam mulia lainnya.

Penghitungan output bijih logam menggunakan metode pendekatan produksi dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan deflator Indeks Harga Produsen (IHP) tembaga dan emas.

2.2.4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya

Subkategori ini mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang pada umumnya berada pada permukaan bumi. Hasil dari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat, dan komoditi penggalian selain tersebut di atas. Termasuk dalam subkategori ini adalah komoditi garam hasil penggalian. Output dan produksi barang-barang galian terdapat pada publikasi Statistik Penggalian Tahunan. Sementara itu, PDRB triwulan diestimasi menggunakan data produksi bahan galian dari Survei Khusus Triwulanan Neraca Produksi (SKTNP) yang dilakukan Direktorat Neraca Produksi (DNP).

2.3 Industri Pengolahan

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk Kategori Industri Pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang

sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

2.3.1 Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi

Subkategori ini mencakup kegiatan perubahan minyak, gas bumi dan batubara menjadi produk yang bermanfaat seperti pengilangan minyak dan gas bumi, yang meliputi pemisahan minyak bumi menjadi produk komponen melalui teknis seperti pemecahan dan penyulingan. Produk khas yang dihasilkan yaitu kokas, butane, propane, petrol, gas hidrokarbon dan metan, gasoline, minyak tanah, gas etane, propane dan butane sebagai produk penyulingan minyak. Termasuk disini adalah pengoperasian tungku batubara, produksi batubara dan semi batubara, gas batubara, ter, lignit dan kokas. KBLI 2009 : kode 19.

2.3.2 Industri Makanan dan Minuman

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori, yaitu industri makanan dan industri minuman. Industri makanan mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan. Industri minuman mencakup pembuatan minuman beralkohol maupun tidak beralkohol, air minum mineral, bir dan anggur, dan pembuatan minuman beralkohol yang disuling. Kegiatan ini tidak mencakup pembuatan jus buah-buahan dan sayur-sayuran, minuman dengan bahan baku susu, dan pembuatan produk teh, kopi dan produk the dengan kadar kafein yang tinggi. KBLI 2009 : kode 10 dan 11.

2.3.3 Industri Pengolahan Tembakau

Subkategori ini meliputi pengolahan tembakau atau produk pengganti tembakau, rokok, cerutu, cangklong, snuff, chewing dan pemetongan serta pengeringan tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau. Beberapa produk yang dihasilkan rokok dan cerutu, tembakau pipa, tembakau sedot (snuff), rokok kretek, rokok putih dan lain-lain. KBLI 2009 : kode 12.

2.3.4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori yaitu industri tekstil dan industri pakaian jadi. Industri tekstil mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil

dan bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti : sprei, taplak meja, gorden, selimut, permadani, tali temali, dan lain-lain). Industri pakaian jadi mencakup semua pekerjaan menjahit dari semua bahan dan semua jenis pakaian dan aksesoris, tidak ada perbedaan dalam pembuatan antara baju anak-anak dan orang dewasa, atau pakaian tradisional dan modern. Subkategori ini juga mencakup pembuatan industri bulu binatang (pakaian dari bulu binatang dan kulit yang berbulu). Contoh produk yang dihasilkan : kain tenun ikat, benang, kain, batik, rajutan, pakaian jadi, pakaian sesuai pesanan, dan lain-lain. KBLI 2009 : kode 13 dan 14.

2.3.5 Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki

Subkategori ini mencakup pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan proses perubahan dari kulit jangat menjadi kulit dengan proses penyamakan atau proses pengawetan dan pengeringan serta pengolahan kulit menjadi produk yang siap pakai, pembuatan koper, tas tangan dan sejenisnya, pakaian kuda dan peralatan kuda yang terbuat dari kulit, dan pembuatan alas kaki. Subkategori ini juga mencakup pembuatan produk sejenisnya dari bahan lain (kulit imitasi atau kulit tiruan), seperti alas kaki dari bahan karet, koper dari tekstil, dan lain-lain. KBLI 2009 : kode 15.

2.3.6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang Anyaman

Subkategori ini mencakup pembuatan barang-barang dari kayu. Kebanyakan digunakan untuk konstruksi dan juga mencakup berbagai proses pengerjaan dari penggergajian sampai pembentukan dan perakitan barang-barang dari kayu, dan dari perakitan sampai produk jadi seperti kontainer kayu. Terkecuali penggergajian, subkategori ini terbagi lagi sebagian besar didasarkan pada produk spesifik yang dihasilkan. Subkategori ini tidak mencakup pembuatan mebel, atau perakitan/pemasangan perabot kayu dan sejenisnya. Contohnya pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso, papan, pengolahan rotan, kayu lapis, barang-barang bangunan dari kayu, kerajinan dari kayu, alat dapur dari kayu, rotan dan bambu. KBLI 2009 : kode 16.

2.3.7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekam

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori yaitu industri kertas dan barang dari kertas, dan industri pencetakan dan reproduksi media rekaman. Industri kertas dan barang dari kertas mencakup pembuatan bubur kayu, kertas, dan produk kertas olahan. Pembuatan dari produk-produk tersebut merupakan satu rangkaian dengan tiga kegiatan utama. Kegiatan pertama pembuatan bubur kertas, lalu yang kedua pembuatan kertas yang menjadi lembaran-lembaran dan

yang ketiga barang dari kertas dengan berbagai teknik pemotongan dan pembentukan, termasuk kegiatan pelapisan dan laminasi. Barang kertas dapat merupakan barang cetakan selagi pencetakan bukanlah merupakan hal yang utama. Industri pencetakan dan reproduksi media rekaman mencakup pencetakan barang-barang dan kegiatan pendukung yang berkaitan dan tidak terpisahkan dengan industri pencetakan; proses pencetakan termasuk bermacam-macam metode/cara untuk memindahkan suatu *image* dari piringan atau layar monitor ke suatu media melalui/dengan berbagai teknologi pencetakan. KBLI 2009 : kode 17 dan 18.

2.3.8 Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional

Subkategori ini terdiri dari dua industri yaitu industri kimia dan industri farmasi dan obat tradisional. Industri kimia mencakup perubahan bahan organik dan non organik mentah dengan proses kimia dan pembentukan produk. Ciri produk kimia dasar yaitu yang membentuk kelompok industri pertama dari hasil produk antara dan produk akhir yang dihasilkan melalui pengolahan lebih lanjut dari kimia dasar yang merupakan kelompok-kelompok industri lainnya. Industri farmasi dan obat tradisional mencakup pembuatan produk farmasi dasar dan preparat farmasi. Golongan ini mencakup antara lain preparat darah, obat-obatan jadi, preparat diagnostik, preparat medis, obat tradisional atau jamu dan produk botanikal untuk keperluan farmasi. KBLI 2009 : kode 20 dan 21.

2.3.9 Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik

Subkategori ini mencakup pembuatan barang plastik dan karet dengan penggunaan bahan baku karet dan plastik dalam proses pembuatannya. Misalnya pembuatan karet alam, pembuatan ban karet untuk semua jenis kendaraan dan peralatan, pengolahan dasar plastik atau daur ulang. Namun demikian, tidak berarti bahwa semua barang dari bahan baku karet dan plastik termasuk di golongan ini, misalnya industri alas kaki dari karet, industri lem, industri matras, industri permainan dari karet, termasuk kolam renang mainan anak-anak. KBLI 2009 : kode 22.

2.3.10 Industri Barang Galian Bukan Logam

Kegiatan ini mencakup pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang berhubungan dengan unsur tunggal suatu mineral murni, seperti gelas dan produk gelas, produk keramik dan tanah liat bakar, semen dan plester. Industri pemotongan dan pengasahan batu serta pengolahan produk mineral lainnya juga termasuk disini. KBLI 2009 : kode 23.

2.3.11 Industri Logam Dasar

Subkategori ini mencakup kegiatan peleburan dan penyulingan baik logam yang mengandung besi maupun tidak dari bijih, potongan atau bongkahan dengan menggunakan bermacam teknik metalurgi. Contoh produk industri besi dan baja dasar, penggilingan baja, pipa, sambungan pipa dari baja, logam mulia, logam dasar bukan besi dan lain-lain. KBLI 2009 : kode 24.

2.3.12 Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik

Subkategori ini mencakup pembuatan produk logam "murni" (seperti suku cadang, *container/wadah* dan struktur), pada umumnya mempunyai fungsi statis atau tidak bergerak, pembuatan perlengkapan senjata dan amunisi, pembuatan komputer, perlengkapan komputer, peralatan komunikasi, dan barang-barang elektronik sejenis, termasuk pembuatan komponennya, pembuatan produk yang membangkitkan, mendistribusikan dan menggunakan tenaga listrik. KBLI 2009 : kode 25, 26 dan 27.

2.3.13 Industri Mesin dan Perlengkapan

Kegiatan yang tercakup dalam Subkategori Industri Mesin dan Perlengkapan adalah pembuatan mesin dan peralatan yang dapat bekerja bebas baik secara mekanik atau yang berhubungan dengan pengolahan bahan-bahan, termasuk komponen mekaniknya yang menghasilkan dan menggunakan tenaga dan komponen utama yang dihasilkan secara khusus. Subkategori ini juga mencakup pembuatan mesin untuk keperluan khusus untuk angkutan penumpang atau barang dalam dasar pembatasan, peralatan tangan, peralatan tetap atau bergerak tanpa memperhatikan apakah peralatan tersebut dibuat untuk keperluan industri, pekerjaan sipil, dan bangunan, pertanian dan rumah tangga. KBLI 2009 : kode 28.

2.3.14 Industri Alat Angkutan

Subkategori ini mencakup Industri kendaraan bermotor dan semi trailer serta industri alat angkutan lainnya. Cakupan dari golongan ini adalah pembuatan kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang atau barang, alat angkutan lain seperti pembuatan kapal dan perahu, lori/gerbong kereta api dan lokomotif, pesawat udara dan pesawat angkasa. Golongan ini juga mencakup pembuatan berbagai suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor, termasuk pembuatan trailer atau semi-trailer. KBLI 2009 : kode 29 dan 30.

2.3.15 Industri Furnitur

Industri Furnitur mencakup pembuatan mebel dan produk yang berkaitan yang terbuat dari berbagai bahan kecuali batu, semen dan keramik. Pengolahan pembuatan mebel adalah metode standar, yaitu pembentukan bahan dan perakitan komponen, termasuk pemotongan, pencetakan dan pelapisan. Perancangan produk baik untuk estetika dan kualitas fungsi adalah aspek yang penting dalam proses produksi. Pembuatan mebel cenderung menjadi kegiatan yang khusus. KBLI 2009 : kode 31.

2.3.16 Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

Subkategori ini mencakup pembuatan berbagai macam barang yang belum dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini. Subkategori ini merupakan gabungan dari industri pengolahan lainnya dan jasa reparasi serta pemasangan mesin dan peralatan. Subkategori ini bersifat residual, proses produksi, bahan input dan penggunaan barang-barang yang dihasilkan dapat berubah-ubah secara luas dan ukuran umum. Subkategori ini tidak mencakup pembersihan mesin industri, perbaikan dan pemeliharaan peralatan komputer dan komunikasi serta perbaikan dan pemeliharaan barang-barang rumah tangga. Tetapi mencakup perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatan khusus barang-barang yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan tujuan untuk pemulihan mesin, peralatan dan produk lainnya. KBLI 2009 : kode 32 dan 33.

Sumber data Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi terdiri dari data produksi pengilangan migas diperoleh dari PT Pertamina RO 2 Dumai dan Ditjen Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Data produksi/indikator produksi industri batubara diperoleh dari Direktorat Statistik Industri BPS. Data harga produk pengilangan minyak bumi diperoleh dari Ditjen Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, harga LNG diperoleh dari harga ekspor LNG dari Direktorat Statistik Distribusi BPS, kurs ekspor dari Direktorat Neraca Pengeluaran BPS, sedangkan indikator harga untuk industri batubara diperoleh dari Direktorat Statistik Harga BPS. Data struktur biaya diperoleh dari Publikasi Statistik Pertambangan Migas BPS.

Sumber data Industri Makanan dan Minuman sampai dengan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan terdiri dari produksi/indikator produksi yang dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu indeks produksi Industri Besar Sedang (IBS) dan indeks produksi Industri Mikro dan Kecil (IMK) diperoleh dari Direktorat Statistik Industri-BPS. Data

harga/indikator harga diperoleh dari Direktorat Statistik Harga-BPS. Data struktur biaya diperkirakan dari Hasil Survei Tahunan IBS dan Hasil Survei Tahunan IMK-BPS ditambah dengan berbagai survei khusus yang dilakukan DNP.

Pendekatan penghitungan untuk kegiatan industri pengolahan migas menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku adalah merupakan perkalian antara produksi dengan harga untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga konstan digunakan cara revaluasi, yaitu produksi pada masing-masing tahun dikalikan dengan harga pada tahun dasar 2010. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih output atas dasar harga konstan dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan.

Pendekatan estimasi untuk Industri Batubara sampai dengan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga konstan menggunakan pendekatan ekstrapolasi yaitu perkalian antara output tahun dasar dengan indeks produksi untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga berlaku dihitung dari output atas dasar harga konstan dikalikan indeks harga pada masing-masing tahun. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari output atas dasar harga konstan dikurangi dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan

Dalam penghitungan NTB Industri pengolahan subkategori ini, tabel SUT 2010 menjadi acuan sebagai tahun dasar 2010.

2.4 Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori ini mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta pendinginan udara dan air untuk tujuan produksi es. Produksi es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin dan gas yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan AC.

2.4.1 Ketenagalistrikan

Subkategori ini mencakup pembangkitan, pengiriman dan penyaluran tenaga listrik kepada konsumen, baik yang diselenggarakan oleh PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun oleh perusahaan swasta (non-PLN), seperti pembangkitan listrik oleh perusahaan milik Pemerintah Daerah, dan listrik yang diusahakan oleh swasta (perorangan maupun perusahaan) dengan tujuan untuk dijual. Listrik yang dibangkitkan atau diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan distribusi, dan listrik yang dicuri.

Metode penghitungan dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga dasar per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga dasar per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB, baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010, adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Data yang diperlukan adalah data produksi dan harga. Data produksi berupa listrik terjual dan listrik dibangkitkan baik oleh PLN maupun non-PLN. Sama seperti data produksi, harga juga mencakup harga penjualan dan harga pembangkitan, baik data produksi maupun data harga, diambil dari PT. PLN Wilayah Riau dan Kepri setiap triwulan dan juga statistik PLN yang terbit setiap tahun. Selain itu juga diperlukan data subsidi listrik dari Kementerian Keuangan.

2.4.2 Pengadaan Gas dan Produksi Es

Subkategori ini menghasilkan gas alam, gas buatan, uap/air panas, udara dingin dan produksi es. Subkategori ini mencakup pembuatan gas dan pendistribusian gas alam atau gas buatan ke konsumen melalui suatu sistem saluran pipa, dan kegiatan penjualan gas. Subkategori ini juga mencakup penyediaan gas melalui berbagai proses, pengangkutan, pendistribusian dan penyediaan semua jenis bahan bakar gas, penjualan gas kepada konsumen melalui saluran pipa. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang mengurus perdagangan gas melalui sistem distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian perubahan komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas.

Kegiatan pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es mencakup kegiatan produksi, pengumpulan dan pendistribusian uap dan air panas untuk pemanas, energi dan tujuan lain, produksi dan distribusi pendinginan udara, pendinginan air untuk tujuan pendinginan dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan.

Metode penghitungan seri 2010 dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Sumber data produksi dan harga gas kota diperoleh dari PT PGN (Persero). Data produksi dilaporkan langsung oleh PT. PGN Area Pekanbaru setiap tiga bulan. Sementara data harga dikutip dari laporan keuangan PT. PGN yang terbit setiap tiga bulanan. Untuk data harga, terdapat jeda satu triwulan sehingga harus diestimasi untuk triwulan terakhir.

2.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan, baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini karena kegiatan ini seringkali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran.

Metode penghitungan nilai tambah bruto untuk pengadaan air tahun dasar 2010 menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Dan untuk data harga yang tidak tersedia pada tahun terakhir diperkirakan dengan kenaikan laju IHK komponen bahan bakar, penerangan dan air bersih. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB

baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Penghitungan pengelolaan sampah/limbah dengan pendekatan pendapatan. Dalam lembar kerja pengelolaan, pembuangan dan pembersihan sampah dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Kegiatan yang dilakukan pemerintah menggunakan APBN/APBD.

Sumber data produksi adalah Subdit Statistik Pertambangan dan Energi BPS, APBD (Kemenkeu), data output sampah diperoleh dari Subdit Statistik IBS BPS, data harga diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS, data struktur biaya diperoleh dari Hasil Survei Tahunan Air Bersih BPS.

2.6 Konstruksi

Kategori Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.

Hasil kegiatan konstruksi antara lain konstruksi gedung tempat tinggal; konstruksi gedung bukan tempat tinggal; konstruksi bangunan sipil, misal jalan, tol, jembatan, landasan pesawat terbang, jalan rel dan jembatan kereta api, terowongan, bendungan, waduk, menara air, jaringan irigasi, drainase, sanitasi, tanggul pengendali banjir, terminal, stasiun, parkir, dermaga, pergudangan, pelabuhan, bandara, dan sejenisnya; konstruksi bangunan elektrik dan telekomunikasi misal pembangkit tenaga listrik, transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi, dan sebagainya; instalasi gedung dan bangunan sipil misal instalasi listrik termasuk alat pendingin dan pemanas ruangan, instalasi gas, instalasi air bersih dan air limbah serta saluran drainase, dan sejenisnya; pengerukan meliputi pengerukan sungai, rawa, danau dan alur pelayaran, kolam dan kanal pelabuhan baik bersifat pekerjaan ringan, sedang maupun berat; penyiapan lahan untuk pekerjaan konstruksi, termasuk pembongkaran dan penghancuran gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya; penyelesaian konstruksi sipil seperti pemasangan kaca dan aluminium, pengerjaan lantai, dinding dan plafon gedung, pengecatan, pengerjaan interior dan dekorasi dalam penyelesaian akhir, pengerjaan

eksterior dan pertamanan pada gedung dan bangunan sipil lainnya; penyewaan alat konstruksi dengan operatornya seperti derek lori, molen, bulldoser, alat pencampur beton, mesin pancang, dan sejenisnya.

Metode yang digunakan untuk memperkirakan output harga berlaku adalah metode ekstrapolasi dengan indeks konstruksi harga berlaku sebagai ekstrapolatornya. Untuk mendapatkan output harga konstan, output harga berlaku dideflasi dengan menggunakan IHPB konstruksi sebagai deflator. Sementara konsumsi antara didapat dengan menggunakan metode *commodity flow* beberapa komoditas utama dari konsumsi antara, misalnya produksi semen, kayu, juga bahan galian. NTB berlaku didapat dari nilai output berlaku dikurangi dengan biaya antara berlaku. Sementara NTB konstan didapat dari mengalikan output konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data indikator produksi kayu log, bambu dan produk industri bukan migas dari Subdirektorat Neraca Barang BPS, produksi aspal dari Statistik Perminyakan Indonesia (SPI) Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ekspor semen dari Subdirektorat Statistik Ekspor BPS dan Asosiasi Semen Indonesia (ASI), impor semen dan bahan bangunan SITC 3 digit dari Subdirektorat Statistik Impor BPS. Indikator harga berupa IHPB bahan bangunan dari Subdirektorat Statistik Harga Perdagangan Besar BPS. Indeks konstruksi dari publikasi Statistik Konstruksi, Subdirektorat Statistik Konstruksi BPS.

2.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam.

Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir, dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan pedagang eceran melakukan penjualan kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, *department store*, kios, *mail-order houses*, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi.

2.7.1 Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

Subkategori ini mencakup semua kegiatan (kecuali industri dan penyewaan) yang berhubungan dengan mobil dan motor, termasuk lori dan truk, sebagaimana perdagangan besar dan eceran, perawatan dan pemeliharaan mobil dan motor baru maupun bekas. Termasuk perdagangan besar dan eceran suku cadang dan aksesoris mobil dan motor, juga mencakup kegiatan agen komisi yang terdapat dalam perdagangan besar dan eceran kendaraan.

2.7.2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor

Subkategori ini mencakup kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran dan merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan selain produk mobil dan sepeda motor. Perdagangan besar nasional dan internasional atas usaha sendiri atau atas dasar balas jasa atau kontrak (perdagangan komisi) juga merupakan cakupan dalam subkategori ini.

Output lapangan usaha perdagangan adalah margin perdagangan, yaitu nilai jual dikurangi nilai beli barang yang diperdagangkan setelah dikurangi biaya angkutan yang dikeluarkan oleh pedagang. Output perdagangan (berlaku/konstan) dihitung menggunakan metode tidak langsung, yaitu menggunakan metode pendekatan arus barang "*commodity flow approach*". Margin perdagangan diperoleh dengan mengalikan rasio margin perdagangan dengan output barang yang dihasilkan oleh industri penghasil barang domestik ditambah impor barang dari luar negeri. Kemudian output atau margin perdagangan tersebut dikalikan dengan rasio nilai tambah untuk

memperoleh nilai tambah perdagangan. Sedangkan reparasi mobil dan sepeda motor dihitung dengan pendekatan produksi, dengan indikator produksinya adalah jumlah kendaraan. Untuk mendapatkan nilai tambah konstannya nilai tambah berlaku yang diperoleh di-deflate menggunakan IHK umum (BPS).

Sumber data yang digunakan dalam Kategori Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor adalah data output barang dari komoditi flow pertanian dan industri domestik, impor barang dan Indeks Harga Konsumen (Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau) dan survei lainnya yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi BPS, seperti SKSJ dan SKNP.

2.8 Transportasi dan Pergudangan

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.

2.8.1 Angkutan Rel

Angkutan rel untuk penumpang dan atau barang yang menggunakan jalan rel kereta melalui antar kota, dalam kota dan pengoperasian gerbong tidur atau gerbong makan kereta api yang sepenuhnya dikelola oleh PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI).

Metode estimasi yang digunakan yaitu pendekatan produksi. Indikator produksi adalah jumlah penumpang dan barang yang diangkut atau jumlah km-penumpang dan km-ton barang. Output dan NTB atas dasar harga berlaku diolah dari laporan keuangan PT. KAI. Sedangkan data indikator harga menggunakan IHK jasa angkutan jalan rel dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi yaitu dengan menggunakan jumlah penumpang dan barang sebagai ekstrapolatornya. NTB atas dasar harga konstan 2010

diperoleh berdasarkan perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun 2010.

2.8.2 Angkutan Darat

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya, baik bermotor maupun tidak bermotor. Termasuk pula kegiatan *charter/sewa* kendaraan baik dengan atau tanpa pengemudi; serta jasa angkutan dengan saluran pipa untuk mengangkut minyak mentah, gas alam, produk minyak, kimia dan air.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku merupakan perkalian antara indikator produksi (jumlah kendaraan wajib uji) dengan indikator harga (rata-rata output untuk masing-masing jenis alat angkutan). Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dengan indeks jumlah kendaraan sebagai ekstrapolatornya. NTB dihitung berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Indikator produksi berupa jumlah kendaraan/armada wajib uji (taksi, angkot, bis, dan truk) diperoleh dari Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Data untuk penghitungan struktur output dan rasio NTB diperoleh dari laporan keuangan PT. Perusahaan Pengangkutan Djakarta (Perum PPD), PT. Djawatan Angkoetan Motor RI (Perum DAMRI) dan beberapa perusahaan angkutan darat *go public* dari Bursa Efek Indonesia. Sedangkan data indikator harga menggunakan IHK jasa angkutan jalan dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

2.8.3 Angkutan Laut

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan kapal laut yang beroperasi di dalam dan ke luar daerah domestik. Tidak termasuk kegiatan pelayaran laut yang diusahakan oleh perusahaan lain yang berada dalam satu kesatuan usaha, di mana kegiatan pelayaran ini sifatnya hanya menunjang kegiatan induknya dan data yang tersedia sulit untuk dipisahkan.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya. Output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode ekstrapolasi, yaitu indeks produksi jumlah

penumpang dan indeks muat barang sebagai ekstrapolatornya. Sedangkan NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut dari PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Pekanbaru dan Dumai, serta Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang dan rata-rata output per barang diperoleh dari PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) dan PT. Djakarta Lloyd, serta IHK jasa angkutan laut dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan *go public* angkutan laut dari Bursa Efek Indonesia.

2.8.4 Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Kegiatan yang dicakup meliputi kegiatan pengangkutan penumpang, barang dan kendaraan dengan menggunakan kapal/angkutan sungai dan danau baik bermotor maupun tidak bermotor, serta kegiatan penyeberangan dengan alat angkut kapal ferry.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harga yang terdiri dari angkutan sungai, danau serta penyeberangan. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi rata-rata tertimbang jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Selanjutnya, NTB diperoleh berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Data indikator produksi berupa jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut diperoleh dari publikasi tahunan Statistik Perhubungan, Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang, rata-rata output per barang dan rata-rata output per kendaraan diperoleh dari PT. Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry, serta IHK jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba PT. ASDP Indonesia.

2.8.5 Angkutan Udara

Kegiatan ini meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang beroperasi di Indonesia.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut, atau jumlah km-penumpang dan ton-km barang yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya untuk masing-masing angkutan penumpang dan barang baik domestik maupun internasional. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut. Sedangkan NTB diperoleh dengan mengalikan rasio NTB dengan outputnya untuk masing-masing harga tersebut.

Data indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut diperoleh dari PT. Angkasa Pura II (Pekanbaru) dan Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang/km-penumpang dan rata-rata output per barang/km-ton barang diperoleh dari laporan perusahaan penerbangan nasional, PT. Garuda Indonesia Airlines dan PT. Merpati Nusantara Air-lines serta IHK jasa angkutan udara dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

2.8.6 Jasa Penunjang Angkutan, Pergudangan dan Pos dan Kurir

Mencakup kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan, yaitu jasa-jasa pelabuhan udara, laut, sungai, darat (terminal dan parkir), jasa pelayanan bongkar muat barang darat dan laut, keagenan penumpang, jasa ekspedisi, jalan tol, pergudangan, jasa pengujian kelayakan angkutan darat dan laut, jasa penunjang lainnya, pos dan jasa kurir.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Nilai output dan NTB atas dasar harga berlaku dari hasil pengolahan data pendapatan dan pengeluaran/biaya dari laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan *go public*. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode deflasi, yaitu dengan membagi nilai output atas dasar berlaku dengan indeks harga tahun dasar 2010. Nilai NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan mengalikan output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan jasa penunjang angkutan diperoleh dari badan usaha milik negara, seperti PT. Angkasa Pura II (Pekanbaru), PT. Pelabuhan Indonesia Pekanbaru dan Dumai, PT. Jasa Marga, dan beberapa perusahaan *go public* dari Bursa Efek Indonesia. Sedangkan indikator harga berupa IHK sarana penunjang transpor dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

2.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

2.9.1 Penyediaan Akomodasi

Subkategori ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung atau pelancong lainnya. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja, dan sejenisnya (seperti asrama atau rumah kost dengan makan maupun tidak dengan makan). Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau dengan makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi. Yang dimaksud akomodasi jangka pendek seperti hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel, dan sejenisnya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap selama kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dengan penginapan, alasan penggabungan ini karena datanya sulit dipisahkan.

NTB subkategori akomodasi diperoleh dengan menggunakan pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah malam kamar terjual dan indikator harganya adalah rata-rata tarif per malam kamar. Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harganya. Sedangkan NTB atas dasar harga konstan diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB. Output dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode revaluasi.

Data produksi menggunakan data malam kamar terjual dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau. Indikator harga menggunakan data tarif dari Survei Hotel Tahunan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Pariwisata BPS.

2.9.2 Penyediaan Makan dan Minum

Kegiatan subkategori ini mencakup pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran *self service* atau restoran *take away*, baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan.

Pendekatan yang digunakan untuk menghitung outputnya yaitu melalui pendekatan produksi. Indikator produksinya berupa jumlah penduduk pertengahan tahun. Dan indikator harganya berupa pengeluaran rata-rata per kapita atas makan minum jadi di luar rumah. Hasil perkalian kedua indikator tersebut diperoleh output atas dasar harga berlaku. Sedangkan, output atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi, dengan IHK kelompok makanan jadi, minuman, dan rokok sebagai deflator. Dan NTB atas dasar harga berlaku maupun konstan diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB.

Data indikator produksi subkategori penyediaan makan dan minum bersumber dari Proyeksi Penduduk Indonesia Sensus Penduduk 2010 BPS. Sedangkan data indikator harga diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan IHK makanan jadi, minuman dan rokok dari publikasi Indikator Ekonomi BPS.

2.10 Informasi dan Komunikasi

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori terdiri dari beberapa industri yaitu penerbitan, produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik, penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi), telekomunikasi, pemrograman, konsultasi komputer dan teknologi informasi.

Kegiatan industri penerbitan mencakup penerbitan buku, brosur, *leaflet*, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik, penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau tabloid, termasuk penerbitan piranti lunak. Semua bentuk penerbitan (cetakan, elektronik atau audio, pada internet, sebagai produk multimedia seperti *cd-rom* buku referensi dan lain-lain).

Kegiatan industri produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik ini mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, video tape atau disk untuk diputar dalam bioskop atau untuk siaran televisi, kegiatan penunjang seperti *editing*, *cutting*, *dubbing* film dan lain-lain, pendistribusian dan pemutaran gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain. Pembelian dan penjualan hak distribusi gambar bergerak dan produksi film lainnya. Selain itu juga mencakup kegiatan perekaman suara yaitu produksi perekaman master suara asli, merilis, mempromosikan dan mendistribusikannya, penerbitan musik seperti kegiatan jasa perekaman suara dalam studio atau tempat lain.

Kegiatan industri penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi) ini mencakup pembuatan isi siaran atau perolehan hak untuk menyalurkannya dan kemudian menyiarkannya, seperti radio, televisi dan program hiburan, berita, perbincangan dan sejenisnya. Juga termasuk penyiaran data, khususnya yang terintegrasi dengan penyiaran radio atau TV.

Kegiatan industri telekomunikasi ini mencakup kegiatan penyediaan telekomunikasi dan kegiatan jasa yaitu pemancar suara, data, naskah, bunyi dan video. Fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini dapat berdasar pada teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Umumnya kegiatan ini adalah transmisi dari isi, tanpa terlibat dalam proses pembuatannya.

Kegiatan industri pemrograman, konsultasi komputer dan teknologi informasi ini mencakup kegiatan penyediaan jasa keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan pendukung piranti lunak; perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak komputer dan teknologi komunikasi; manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien serta kegiatan profesional lainnya dan kegiatan yang berhubungan dengan teknis komputer.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku didapat dari nilai produksi/pendapatan hasil olahan Survei Industri Besar dan Sedang, serta laporan keuangan perusahaan-perusahaan *go public* bergerak di industri informasi dan

telekomunikasi, sedangkan NTB atas dasar harga berlaku didapat dari penjumlahan upah dan gaji, laba/rugi, penyusutan, dan komponen-komponen lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode deflasi, dan NTB atas dasar harga konstan didapat dari perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan informasi diperoleh dari Subdit Statistik Industri Besar dan Sedang dan Subdit Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi BPS, perusahaan *go public* dibidang televisi dan teknologi informasi, Direktorat Pembinaan Kesenian dan perfilman, Dirjen Ekraf Seni dan Budaya Kemenparekraf, sedangkan kegiatan telekomunikasi diperoleh dari perusahaan telekomunikasi *go public* seperti PT. Telkom dan anak perusahaannya, PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel); PT. Indosat dan anak perusahaannya, Excel Axiata; PT. Bakrie Telecom; dan PT. Smartfren Telecom, Sedangkan indikator harga berupa indeks harga seperti IHP percetakan dan penerbitan dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS; IHK umum dan IHK jasa komunikasi dari Subdit Statistik Harga Konsumen BPS.

2.11 Jasa Keuangan dan Asuransi

Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang aset, seperti kegiatan perusahaan *holding* dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

2.11.1 Jasa Perantara Keuangan

Kegiatan ini mencakup kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pinjaman dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, seperti menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit/pinjaman baik kredit jangka pendek/menengah dan panjang. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok Jasa Perantara Keuangan sedangkan memberikan jasa lainnya hanya kegiatan pendukung, seperti mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga, mendiskonto surat wesel/kertas dagang/surat hutang dan sejenisnya, menyewakan tempat menyimpan barang berharga, dan sebagainya. Kegiatan tersebut antara lain bank sentral, perbankan konvensional maupun syariah,

bank swasta nasional, bank campuran dan asing, dan bank perkreditan rakyat, juga koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, baitul maal wantanwil dan jasa perantara moneter lainnya.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi untuk bank komersial (termasuk BPR) dan pendekatan pengeluaran untuk bank sentral (Bank Indonesia). Output atas dasar harga berlaku dari usaha bank komersial adalah jumlah penerimaan atas jasa pelayanan bank yang diberikan kepada pemakainya, seperti biaya administrasi atas transaksi dengan bank, dan imputasi jasa implisit bank yang diukur dengan menggunakan metode FISIM, juga pendapatan lainnya yang diperoleh karena melakukan kegiatan pendukung, seperti mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga. Output bank sentral (Bank Indonesia) dihitung adalah jumlah atas biaya-biaya yang dikeluarkan, termasuk konsumsi antara, pengeluaran untuk upah/gaji pegawai, pajak, dan penyusutan. Sedangkan output KSP, BMT dan jasa moneter lainnya diperoleh dengan mengalikan rata-rata pendapatan usaha dengan masing-masing jumlah usahanya. Penghitungan NTB atas dasar harga konstan 2010 dilakukan dengan menggunakan metode deflasi dan sebagai deflatornya adalah IHK Umum dan Indeks Implisit PDB tanpa Jasa Perantara Keuangan. Data output dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari Bank Indonesia.

2.11.2 Asuransi dan Dana Pensiun

Asuransi dan dana pensiun mencakup penjaminan tunjangan hari tua serta polis asuransi, dimana premi tersebut diinvestasikan untuk digunakan terhadap klaim yang akan datang.

Asuransi dan Reasuransi

Asuransi dan reasuransi adalah salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang usaha pokoknya menanggung resiko-resiko atas terjadinya musibah/kecelakaan terhadap barang atau orang, termasuk tunjangan hari tua. Pihak tertanggung dapat menerima biaya atas hancur/rusakanya barang atau karena terjadinya kematian pihak tertanggung. Golongan ini mencakup kegiatan asuransi jiwa, asuransi non jiwa dan reasuransi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan asuransi dan reasuransi merupakan penjumlahan dari hasil *underwriting*, hasil investasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output

atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. NTB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan asuransi dan reasuransi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

Dana Pensiun

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala atau sekaligus pada masa pensiun sebagai santunan hari tua/uang pensiun. Dana pensiun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan dana pensiun merupakan hasil pengolahan laporan keuangan kegiatan tersebut. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan dana pensiun diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

2.11.3 Jasa Keuangan Lainnya

Jasa keuangan lainnya meliputi mencakup kegiatan *leasing*, kegiatan pemberian pinjaman oleh lembaga yang tidak tercakup dalam perantara keuangan, serta kegiatan pendistribusian dana bukan dalam bentuk pinjaman. Subkategori ini mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pegadaian, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, modal ventura, anjak piutang, dan jasa keuangan lainnya.

Pegadaian

Pegadaian mencakup usaha penyediaan fasilitas pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai jaminan barang bergerak yang diserahkan, dengan tidak memperhatikan penggunaan dana pinjaman yang diberikan.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan pegadaian merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT. Pegadaian yang terdiri dari pendapatan sewa modal, pendapatan administrasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan pegadaian diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT. Pegadaian, dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, pembiayaan anjak piutang, dan pembiayaan *leasing* lainnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi mencakup kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk *finance lease* untuk digunakan oleh penyewa (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pembiayaan konsumen mencakup usaha pembiayaan melalui pengadaan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. Pembiayaan kartu kredit mencakup usaha pembiayaan dalam transaksi pembelian barang dan jasa para pemegang kartu kredit. Pembiayaan anjak piutang mencakup usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang suatu perusahaan.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan lembaga pembiayaan merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan pembiayaan. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai

deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga pembiayaan diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

Modal Ventura

Modal ventura mencakup kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan modal ventura. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan modal ventura diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

2.11.4 Jasa Penunjang Keuangan

Jasa penunjang keuangan meliputi kegiatan yang menyediakan jasa yang berhubungan erat dengan aktivitas jasa keuangan, asuransi, dan dana pensiun. Subkategori ini mencakup kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek), manager investasi, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, wali amanat, jasa penukaran mata uang, jasa broker asuransi dan reasuransi, dan kegiatan penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun lainnya.

Administrasi Pasar Uang (Bursa Efek)

Administrasi pasar uang (bursa efek) mencakup usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana perdagangan efek. Keegiatannya mencakup operasi dan pengawasan pasar uang, seperti bursa kontrak komoditas, bursa surat berharga, serta bursa saham.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT. Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari pendapatan jasa transaksi efek, jasa pencatatan, jasa informasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) diperoleh dari PT. BEI dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

Manager Investasi

Manager investasi mencakup usaha mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

Metode estimasi untuk output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan manager investasi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan manager investasi diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

Lembaga Kliring dan Penjaminan

Lembaga kliring dan penjaminan mencakup usaha menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT. Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT. KPEI). Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan

sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga kliring dan penjaminan diperoleh dari PT. Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT. KPEI). Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Lembaga penyimpanan dan penyelesaian mencakup usaha menyelenggarakan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain, serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI). Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga penyimpanan dan penyelesaian diperoleh dari PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI). Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

Wali Amanat

Wali amanat (*trustee*) mencakup kegiatan usaha pihak yang dipercayakan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan wali amanat. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan wali amanat diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

Jasa Penukaran Mata Uang

Jasa penukaran mata uang (*money changer*) mencakup usaha jasa penukaran berbagai jenis mata uang, termasuk pelayanan penjualan mata uang.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan jasa penukaran mata uang. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa penukaran mata uang diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

Jasa Broker Asuransi dan Reasuransi

Jasa broker asuransi dan reasuransi mencakup usaha yang memberikan jasa dalam rangka pelaksanaan penutupan objek asuransi milik bertanggung kepada perusahaan-perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai penanggung.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan broker asuransi dan reasuransi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa broker asuransi dan reasuransi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

2.12 Real Estat

Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa real estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung, pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real estat adalah properti berupa tanah dan bangunan.

Output untuk persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita untuk sewa rumah, kontrak rumah, sewa beli rumah dinas, perkiraan sewa rumah, pajak dan pemeliharaan rumah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sedangkan output usaha persewaan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara luas bangunan yang disewakan dengan rata-rata tarif sewa per m². NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya. NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya indeks luas bangunan.

Sumber data usaha persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh berdasarkan hasil Susenas dan Sensus Penduduk BPS (imputasi sewa rumah). Sedangkan data produksi usaha persewaan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil penelitian asosiasi. Struktur input pada usaha persewaan bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil Survei Khusus Sektor Perdagangan dan Jasa (SKSPJ) BPS.

2.13 Jasa Perusahaan

Kategori Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya. Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk kategori N antara lain jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa

keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

Jasa Hukum

Jasa hukum mencakup usaha jasa pengacara/penasihat hukum, notaris, lembaga bantuan hukum, serta jasa hukum lainnya.

Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksaan

Jasa akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan mencakup usaha jasa pembukuan, penyusunan, dan analisis laporan keuangan, persiapan atau pemeriksaan laporan keuangan dan pengujian laporan serta sertifikasi keakuratannya, termasuk juga jasa konsultasi perpajakan.

Jasa Arsitek dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis Lainnya

Jasa arsitek dan teknik sipil serta konsultasi teknis mencakup usaha jasa konsultasi arsitek, seperti jasa arsitektur perancangan gedung dan *drafting*, jasa arsitektur perencanaan perkotaan, jasa arsitektur pemugaran bangunan bersejarah, serta jasa inspeksi gedung atau bangunan.

Periklanan

Periklanan mencakup usaha jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media, termasuk juga kegiatan menciptakan dan menempatkan iklan di surat kabar, majalah/tabloid, radio, televisi, internet, dan media lainnya.

Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil

Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil mencakup usaha jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya.

Jasa Penyaluran Tenaga Kerja

Jasa penyaluran tenaga kerja mencakup usaha jasa penampungan dan penyaluran para tuna karya yang siap pakai, seperti agen penyalur jasa tenaga kerja Indonesia, agen penyalur pembantu rumah tangga, dan lainnya.

Jasa Kebersihan Umum Bangunan

Jasa kebersihan umum bangunan mencakup usaha jasa kebersihan bermacam jenis gedung, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan, dan gedung sekolah.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output kategori jasa perusahaan atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode revaluasi. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa jumlah tenaga kerja diperoleh dari Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

2.14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan negara, keamanan dan keselamatan negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan sosial wajib. Kegiatan yang diklasifikasikan di kategori lain dalam KBLI tidak termasuk pada kategori ini meskipun dilakukan oleh badan pemerintahan. Sebagai contoh administrasi sistem sekolah, peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum termasuk pada kategori ini, tetapi pengajaran itu sendiri masuk kategori pendidikan (P) dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada kategori Q.

NTB administrasi pemerintahan atas dasar harga berlaku merupakan penjumlahan seluruh belanja pegawai dari kegiatan administrasi pemerintahan dan pertahanan serta jasa pemerintahan lainnya ditambah dengan penyusutan. Perkiraan NTB atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan cara ekstrapolasi. Dan indeks tertimbang jumlah pegawai negeri sipil menurut golongan kepangkatan sebagai ekstrapolatornya.

Data bersumber dari realisasi APBN, Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan; realisasi anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan; Statistik Keuangan Pemerintah Daerah (K1, K2, K3), BPS; realisasi APBD, Biro Keuangan Pemerintah Daerah; jumlah pegawai negeri sipil, Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

2.15 Jasa Pendidikan

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokkan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

Penghitungan NTB jasa pendidikan pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran dan untuk jasa pendidikan swasta menggunakan pendekatan pendekatan produksi. Untuk NTB jasa pendidikan pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan jasa pendidikan swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari realisasi APBN/APBD; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; berbagai survei khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi dan Pengeluaran BPS; Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

2.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup jasa rumah sakit; jasa klinik; jasa rumah sakit lainnya; praktek dokter; jasa pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis; jasa pelayanan kesehatan tradisional; jasa pelayanan penunjang kesehatan; jasa angkutan khusus pengangkutan orang sakit (*medical evacuation*); jasa kesehatan hewan; jasa kegiatan sosial.

Metode penghitungan untuk jasa pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, sedangkan swasta menggunakan pendekatan produksi. NTB jasa kesehatan dan kegiatan sosial pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari realisasi APBN/APBD; Kementerian Kesehatan; Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas); berbagai survei khusus yang dilakukan Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran BPS; Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

2.17 Jasa Lainnya

Kategori jasa lainnya merupakan gabungan 4 kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi kesenian, hiburan, dan rekreasi; jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan; jasa swasta lainnya termasuk kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, badan regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

Kesenian, Hiburan dan Rekreasi

Jasa kesenian, hiburan dan rekreasi berkategori R meliputi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum akan hiburan, kesenian, dan kreativitas, termasuk perpustakaan, arsip, museum, kegiatan kebudayaan lainnya, kegiatan perjudian dan pertaruhan, serta kegiatan olahraga dan rekreasi lainnya.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan menggunakan metode pendekatan produksi, yaitu output diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harga. Output panggung hiburan/kesenian dihitung berdasarkan pajak tontonan yang diterima pemerintah. Output untuk jasa hiburan dan rekreasi lainnya pada umumnya didasarkan pada hasil perkalian antara jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja masing-masing dengan rata-rata output per indikatornya. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi/ekstrapolasi dengan deflator/ekstrapolatornya adalah IHK rekreasi dan olahraga/indeks indikator produksi yang sesuai.

Sumber data produksi jasa kesenian, hiburan dan rekreasi diperoleh dari beberapa sumber, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan data penunjang intern BPS (ketenagakerjaan, Susenas, Sensus Ekonomi, Statistik Harga Konsumen, dan survei-survei khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran).

Kegiatan Jasa Lainnya

Kegiatan ini berkategori S yang mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, serta berbagai kegiatan jasa perorangan lainnya.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari perkalian antara masing-masing jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan untuk memperoleh output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi dimana deflatornya adalah IHK Umum.

Data diperoleh dari internal BPS (Sensus Ekonomi, Subdit Statistik Demografi, Susenas, and Subdirektorat Statistik Harga Konsumen).

Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan

Kegiatan ini berkategori T mencakup kegiatan yang memanfaatkan jasa perorangan untuk melayani rumah tangga yang didalamnya termasuk jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya), dan kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan (di dalamnya termasuk kegiatan pertanian, industri, penggalian, konstruksi, dan pengadaan air).

Output atas dasar harga berlaku untuk jasa perorangan yang melayani rumah tangga/jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya) diperoleh dari perkalian antara pengeluaran perkapita untuk jasa pekerja domestik dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sedangkan NTB nya sama dengan output yang dihasilkan karena konsumsi antara pekerja jasa domestik merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga majikan. Output dan NTB

atas dasar harga berlaku diperoleh dengan hasil survei intern BPS (SKTIR). Sedangkan output pengadaan air diperoleh dengan pendekatan rumah tangga yang menggunakan pompa dan sumur, baik sumur terlindung maupun tidak terlindung. Sementara itu, output dan NTB atas dasar harga konstan, baik untuk kegiatan pekerja domestik maupun kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk digunakan sendiri oleh rumah tangga diperoleh dengan menggunakan metode deflasi dengan deflatornya laju IHK umum.

Sumber data kategori ini diperoleh dari intern BPS, yaitu Susenas, Sensus Penduduk, Subdirektorat Pertambangan, Energi dan Konstruksi (Publikasi Statistik Air Bersih), dan survei khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Pengeluaran.

Kegiatan Badan Internasional dan Ekstra Internasional Lainnya

Kategori U yang mencakup kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilannya, badan regional dan lain-lain, termasuk *The Internasional Moneter Fund*, *The World Bank*, *The World Health Organization* (WHO), *The Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), *The Organization of Petroleum Exporting Countries* (OPEC) dan lain-lain.

Output dan NTB berlaku diperoleh dengan pendekatan biaya yang didapatkan dari laporan keuangan badan internasional dan ekstra internasional lainnya. Sementara, untuk output konstan diperoleh dengan metode deflasi dengan deflator laju IHK umum.

Sumber data diperoleh dari laporan keuangan badan internasional dan ekstra internasional lainnya yang berkantor pusat di Indonesia dan Subdirektorat Statistik Harga Konsumen.

<http://riau.bps.go.id>



III. TINJAUAN EKONOMI PROVINSI RIAU

3.1 Struktur Ekonomi

Perekonomian Riau secara keseluruhan masih ditopang oleh kategori Pertambangan dan Penggalian. Hal ini terlihat dari peranan kategori Pertambangan dan Penggalian yang mencapai 27,93 persen yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Riau tahun 2016. Namun apabila dilihat perkembangannya selama 5 tahun terakhir, kontribusi kategori ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 42,15 persen pada tahun 2012 menjadi 27,93 persen pada tahun 2016. Sebaliknya, kategori Industri Pengolahan yang memberikan kontribusi terbesar kedua dalam perekonomian Riau, mengalami peningkatan dari 20,60 persen pada tahun 2012 menjadi 24,63 persen pada tahun 2016. Peningkatan kontribusi kategori Industri Pengolahan sejalan dengan peningkatan kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Pada tahun 2012 kontribusi kategori ini sebesar 19,08 persen naik menjadi 23,22 persen pada tahun 2016. Komoditas utama dari kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Riau utamanya adalah kelapa sawit yang menjadi bahan baku utama dalam kategori Industri Pengolahan, khususnya Industri Makanan dan Minuman.

Tabel 3.1
Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2012–2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19,08	19,00	19,66	22,33	23,22
B Pertambangan dan Penggalian	42,15	42,21	39,57	30,63	27,93
C Industri Pengolahan	20,60	20,56	20,88	23,87	24,63
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,05	0,06
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F Konstruksi	6,24	6,30	6,69	7,92	8,35
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,69	6,63	7,78	8,89	9,37
H Transportasi dan Pergudangan	0,59	0,62	0,66	0,80	0,83
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,36	0,39	0,47	0,51	0,53
J Informasi dan Komunikasi	0,54	0,52	0,52	0,63	0,64
K Jasa Keuangan dan Asuransi	0,76	0,81	0,80	0,87	0,90
L Real Estat	0,66	0,67	0,68	0,83	0,85

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
M,N	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,48	1,44	1,36	1,55	1,52
P	Jasa Pendidikan	0,38	0,37	0,41	0,50	0,51
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,13	0,13	0,14	0,18	0,18
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,30	0,31	0,34	0,43	0,46
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

3.2 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Riau pada tahun 2016 mengalami percepatan yang cukup signifikan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Riau tahun 2016 mencapai 2,23 persen, sedangkan tahun 2015 hanya sebesar 0,22 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 13,52 persen. Hampir seluruh kategori mengalami pertumbuhan positif, kecuali kategori Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang mengalami kontraksi pada tahun 2016.

Kategori Pertambangan dan Penggalian yang merupakan kategori paling dominan dalam perekonomian Riau justru mengalami kontraksi paling besar, yaitu sebesar 4,22 persen. Namun, kategori lain yang kontribusinya juga cukup signifikan, seperti kategori Industri Pengolahan dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masing-masing tumbuh sebesar 4,61 persen dan 3,98 persen. Disamping itu, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh 4,88 persen, sedangkan kategori Konstruksi yang merupakan kategori kelima terbesar dalam perekonomian Riau mengalami pertumbuhan sebesar 4,92 persen. Sementara itu, kategori-kategori lainnya dengan kontribusi kurang dari 1 persen terhadap perekonomian Riau juga mengalami pertumbuhan positif.

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2012–2016

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,82	4,40	6,15	0,43	3,98
B	Pertambangan dan Penggalian	-1,43	-4,44	-5,24	-6,95	-4,22
C	Industri Pengolahan	6,83	6,95	5,63	3,63	4,61
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,32	3,02	9,40	9,70	13,52
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,87	0,64	1,06	2,41	-0,45
F	Konstruksi	3,70	2,65	8,46	6,39	4,92
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,98	5,59	3,96	1,49	4,88
H	Transportasi dan Pergudangan	11,19	6,76	7,99	5,38	3,06
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,36	5,93	6,97	1,89	3,17
J	Informasi dan Komunikasi	15,71	10,91	5,64	7,15	4,95
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	13,45	9,83	4,93	0,35	5,65
L	Real Estat	7,64	6,63	5,32	8,34	1,52
M,N	Jasa Perusahaan	11,53	8,94	12,84	7,67	2,64
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,21	3,06	1,53	4,39	-0,30
P	Jasa Pendidikan	4,34	4,15	5,90	6,35	0,68
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,19	8,51	8,40	9,94	0,56
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,48	9,30	11,14	10,14	6,35
Produk Domestik Regional Bruto		3,76	2,48	2,71	0,22	2,23

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

3.3 PDRB per Kapita

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan setiap penduduk dalam suatu wilayah adalah PDRB per kapita. Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut dalam periode tertentu, maka akan menghasilkan PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2016, PDRB per kapita Riau mencapai 104,96 juta rupiah naik sebesar 2,11 persen dibandingkan tahun 2015 (102,79 juta rupiah).

Tabel 3.3
PDRB per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp), 2012–2016

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18,12	19,13	21,58	22,95	24,37
B	Pertambangan dan Penggalian	40,05	42,50	43,44	31,49	29,32
C	Industri Pengolahan	19,57	20,70	22,93	24,54	25,85
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	5,93	6,34	7,34	8,14	8,77
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,35	6,68	8,54	9,13	9,84
H	Transportasi dan Pergudangan	0,56	0,62	0,72	0,82	0,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,34	0,39	0,51	0,53	0,56
J	Informasi dan Komunikasi	0,51	0,52	0,57	0,64	0,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,72	0,82	0,88	0,89	0,95
L	Real Estat	0,63	0,67	0,75	0,85	0,89
M,N	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,41	1,45	1,49	1,59	1,60
P	Jasa Pendidikan	0,36	0,38	0,45	0,51	0,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,12	0,13	0,15	0,19	0,19
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,28	0,31	0,37	0,45	0,49
Produk Domestik Regional Bruto		95,00	100,69	109,78	102,79	104,96

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

IV. PERKEMBANGAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA

Sesuai rekomendasi *System of National Accounts* (SNA) 2008, PDRB menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori dan terdiri dari 52 subkategori. Pengelompokan menjadi subkategori maupun golongan disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap kategori, subkategori, dan golongan diuraikan berikut ini.

4.1 Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan

Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi tumpuan dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2016, kategori ini memberi kontribusi terhadap PDRB sebesar 23,22 persen. Golongan tanaman perkebunan merupakan penyumbang terbesar terhadap kategori pertanian yaitu sebesar 84,81 persen dari seluruh nilai tambah sektor pertanian. Namun peranan golongan ini mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir yaitu dari 86,49 persen pada tahun 2012 menjadi 84,81 persen pada tahun 2016.

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai sektor pertanian pada tahun 2016 sebesar 3,98 persen. Jika dilihat lebih rinci, pertumbuhan pada subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian paling besar yaitu 5,26 persen yang diikuti oleh subkategori Perikanan sebesar 1,11 persen. Sedangkan subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu mengalami kontraksi sebesar 0,17 persen. Pada subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan Dan Jasa Pertanian, laju pertumbuhan didominasi oleh tanaman hortikultura sebesar 6,86 persen, perkebunan sebesar 5,49 persen dan jasa pertanian dan perburuan sebesar 4,30 persen.

Tabel 4.1
Peranan Subkategori terhadap PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (persen), 2012-2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	70,99	71,00	71,29	69,32	68,38
a. Tanaman Pangan	5,41	5,41	4,96	5,28	5,59
b. Tanaman Hortikultura	3,03	3,01	3,00	3,35	3,55
c. Tanaman Perkebunan	86,49	86,21	86,54	85,37	84,81
d. Peternakan	3,82	4,05	4,15	4,66	4,67
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	1,25	1,32	1,35	1,34	1,38
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	17,72	16,77	15,96	17,48	18,58
3 Perikanan	11,29	12,23	12,75	13,20	13,04
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

4.2 Pertambangan dan Penggalian

Perekonomian Riau tahun 2016 masih didominasi oleh kategori Pertambangan dan Penggalian, terutama subkategori Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi dengan kontribusi sebesar 77,24 persen. Penyumbang terbesar berikutnya adalah subkategori Pertambangan dan Penggalian Lainnya sebesar 21,88 persen. Sementara subkategori Pertambangan Batubara dan Lignit, serta subkategori Pertambangan Bijih Logam kontribusinya tidak sampai satu persen.

Subkategori Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi merupakan subkategori yang memiliki kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Riau. Namun dalam 5 tahun terakhir, peranannya semakin menurun seiring dengan bergejolaknya harga minyak di pasar internasional dan *lifting* yang semakin berkurang.

Tabel 4.2
Peranan Subkategori terhadap PDRB Kategori Pertambangan dan Penggalian (persen), 2012-2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	87,44	87,61	85,88	79,00	77,24
2 Pertambangan Batubara dan Lignit	1,78	1,89	1,84	0,82	0,77
3 Pertambangan Bijih Logam	0,07	0,06	0,07	0,10	0,11
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	10,71	10,44	12,21	20,08	21,88
Pertambangan dan Penggalian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Secara keseluruhan pada tahun 2016, kategori Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan minus 4,22 persen. Hal ini didorong oleh kontraksi yang terjadi pada semua subkategori, terutama subkategori Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi yang memiliki kontribusi terbesar, mengalami kontraksi 4,32 persen. Disamping itu, sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara secara efektif pada bulan Januari 2014, membuat subkategori Pertambangan Batubara dan Lignit semakin terpuruk, dengan pertumbuhan minus 10,46 persen, sedangkan subkategori Pertambangan Bijih Logam dan Pertambangan dan Penggalian Lainnya masing-masing mengalami kontraksi sebesar 1,22 persen dan 3,59 persen.

4.3 Industri Pengolahan

Subkategori Industri Makanan dan Minuman yang didalamnya termasuk industri CPO, memberikan andil paling besar dalam kategori Industri Pengolahan di Riau. Pada tahun 2016, subkategori ini berkontribusi sebesar 73,93 persen terhadap total kategori Industri Pengolahan, kemudian diikuti oleh Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman sebesar 12,07 persen dan Industri Batubara dan Pengilangan Migas sebesar 7,98 persen. Selanjutnya subkategori Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional dan subkategori Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik masing-masing berkontribusi sebesar 2,25 persen dan 2,18 persen. Sedangkan subkategori lainnya berkontribusi kurang dari 1 persen.

Tabel 4.3
Peranan Subkategori terhadap PDRB Kategori Industri Pengolahan (persen),
2012-2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	7,20	8,66	8,51	8,28	7,98
2 Industri Makanan dan Minuman	72,69	73,37	73,11	73,68	73,93
3 Industri Pengolahan Tembakau	-	-	-	-	-
4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,20	0,19	0,19	0,19	0,20
5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-	-	-
6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0,35	0,33	0,32	0,35	0,36
7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	13,21	11,62	12,02	11,71	12,07
8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	2,30	2,23	2,26	2,30	2,25
9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	3,04	2,64	2,61	2,45	2,18
10 Industri Barang Galian bukan Logam	0,36	0,34	0,33	0,35	0,35

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
12	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11
13	Industri Mesin dan Perlengkapan	-	-	-	-	-
14	Industri Alat Angkutan	0,07	0,06	0,07	0,07	0,07
15	Industri Furnitur	0,37	0,36	0,38	0,41	0,40
16	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10
Industri Pengolahan		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Pada tahun 2016, laju pertumbuhan kategori Industri Pengolahan sebesar 4,61 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan yaitu sebesar 6,29 persen, kemudian diikuti oleh subkategori Industri Makanan dan Minuman sebesar 6,12 persen, subkategori Industri Barang Galian bukan Logam tumbuh 4,47 persen, dan subkategori Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik tumbuh 4,39 persen. Sedangkan subkategori lainnya mengalami pertumbuhan kurang dari 2 persen. Sementara subkategori Industri Tekstil dan Pakaian Jadi, Industri Alat Angkutan, dan Industri Furnitur justru mengalami kontraksi masing-masing sebesar 0,46 persen; 2,06 persen; dan 6,98 persen.

4.4 Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 0,06 persen terhadap perekonomian provinsi Riau pada tahun 2016. Dari kontribusi tersebut, sebanyak 76,19 persen disumbang oleh subkategori Ketenagalistrikan dan 23,81 persen oleh subkategori Pengadaan Gas dan Produksi Es. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi kategori Pengadaan Listrik dan Gas pada tahun 2016 sebesar 13,52 persen. Pertumbuhan subkategori Ketenagalistrikan sebesar 19,84 persen dan Pengadaan Gas dan Produksi Es terkontraksi sebesar 0,63 persen.

Tabel 4.4
Peranan Subkategori terhadap PDRB Kategori Pengadaan Listrik dan Gas (persen),
2012-2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Ketenagalistrikan	58,58	54,97	62,10	70,50	76,19
2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	41,42	45,03	37,90	29,50	23,81
Pengadaan Listrik dan Gas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

4.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan dll. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian.

Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Provinsi Riau selama tahun 2012-2016 sangat kecil, hanya berada pada kisaran angka 0,01 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya juga tidak terlalu besar, hanya 2,41 persen pada tahun 2015, bahkan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,45 persen pada tahun 2016.

4.6 Konstruksi

Kategori Konstruksi merupakan kategori terbesar kelima dalam struktur perekonomian Riau. Pada tahun 2016 kategori konstruksi menyumbang sebesar 8,35 persen terhadap total PDRB Provinsi Riau, meningkat dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 7,92 persen. Tren peningkatan kontribusi kategori ini sudah terlihat pada tahun-tahun sebelumnya, tahun 2012 kontribusinya 6,24 persen meningkat menjadi 6,30 persen pada tahun 2013, demikian seterusnya hingga tahun 2014 sebesar 6,69 persen. Walaupun kontribusi kategori Konstruksi menunjukkan tren peningkatan, namun laju pertumbuhan konstruksi Provinsi Riau mengalami perlambatan dari 6,39 persen pada tahun 2015 menjadi 4,92 persen pada tahun 2016.

4.7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Selama 5 tahun terakhir, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan sumbangan lebih dari 6 persen terhadap PDRB Riau. Kategori ini merupakan

kategori terbesar keempat dalam perekonomian Riau. Bahkan pada tahun 2016, kontribusi kategori ini mencapai 9,37 persen, terutama didorong oleh subkategori Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 72,28 persen. Sementara subkategori Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya memberikan andil sebanyak 27,72 persen. Namun sebaliknya, jika dilihat pertumbuhan atas dasar harga konstan 2010, subkategori Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya mengalami pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 5,08 persen. Sementara subkategori Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 4,80 persen.

Tabel 4.5
**Peranan Subkategori terhadap PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (persen), 2012-2016**

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	30,52	31,55	28,66	27,15	27,72
2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	69,48	68,45	71,34	72,85	72,28
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

4.8 Transportasi dan Pergudangan

Dari enam subkategori yang terdapat dalam kategori Transportasi dan Pergudangan, subkategori Angkutan Darat, subkategori Angkutan Laut, dan subkategori Angkutan Udara yang dominan dalam membentuk PDRB kategori Transportasi dan Pergudangan. Subkategori Angkutan Darat memberikan kontribusi terbesar selama 5 tahun terakhir, dengan nilai kontribusi terhadap kategori ini sebesar 46,12 persen pada tahun 2016. Sedangkan penyumbang terbesar berikutnya adalah Angkutan Laut sebesar 30,46 persen dan Angkutan Udara sebesar 16,24 persen. Dengan semakin banyaknya maskapai penerbangan yang membuka rute ke dan dari Pekanbaru, kontribusi subkategori Angkutan Udara dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Tabel 4.6
Peranan Subkategori terhadap PDRB Kategori Transportasi dan Pergudangan (persen),
2012-2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Angkutan Rel	-	-	-	-	-
2 Angkutan Darat	44,02	44,16	44,16	45,60	46,12
3 Angkutan Laut	33,24	32,53	32,48	31,03	30,46
4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,40	0,42	0,40	0,39	0,40
5 Angkutan Udara	15,12	15,77	15,99	16,15	16,24
6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	7,22	7,12	6,97	6,83	6,78
Transportasi dan Pergudangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

4.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pada tahun 2016, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Provinsi Riau sebesar 0,53 persen. Kontribusi ini lebih banyak berasal subkategori Penyediaan Akomodasi sebesar 76,19 persen dan dari subkategori Penyediaan Makan dan Minum sebesar 23,81 persen. Secara keseluruhan pada tahun 2016, kategori ini mencatatkan laju pertumbuhan sebesar 3,17 persen, mengalami percepatan dibandingkan pada tahun 2015 sebesar 1,89 persen. Jika dilihat per subkategori, selama tahun 2016 kedua subkategori ini tumbuh masing-masing sebesar 1,84 persen dan 7,29 persen.

Tabel 4.7
Peranan Subkategori terhadap PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
(persen), 2012-2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Penyediaan Akomodasi	77,36	78,20	80,43	77,69	76,19
2 Penyediaan Makan Minum	22,64	21,80	19,57	22,31	23,81
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

4.10 Informasi dan Komunikasi

Kategori Informasi dan Komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat penting dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi. Peranan kategori ini terhadap perekonomian Riau selama lima tahun terakhir berada pada kisaran 0,52 persen sampai 0,64 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya pada periode yang sama menunjukkan perlambatan, yaitu 15,71 persen pada tahun 2012 menjadi 4,95 persen pada tahun 2016.

4.11 Jasa Keuangan dan Asuransi

Kegiatan ekonomi pada subkategori Jasa Perantara Keuangan menjadi penyumbang mayoritas kontribusi perekonomian pada kategori Jasa Keuangan dan Asuransi ini. Selama periode 2012-2016, kontribusinya mendominasi lebih dari 88 persen terhadap PDRB kategori Jasa Keuangan dan Asuransi. Penyumbang terbesar berikutnya adalah subkategori Jasa keuangan Lainnya pada kisaran 7 persen, Asuransi dan Dana Pensiun memberikan sumbangan sekitar 3 persen, sementara Jasa Penunjang Keuangan dengan nilai kontribusi terhadap kategori ini dibawah 1 persen.

Tabel 4.8
Peranan Subkategori terhadap PDRB Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi
(persen), 2012-2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Jasa Perantara Keuangan	89,31	89,80	89,33	88,87	88,93
2 Asuransi dan Dana Pensiun	3,01	2,80	2,94	3,14	3,18
3 Jasa Keuangan Lainnya	7,36	7,10	7,44	7,70	7,60
4 Jasa Penunjang Keuangan	0,32	0,30	0,29	0,29	0,29
Jasa Keuangan dan Asuransi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

4.12 Real Estat

Kategori Real Estat memberikan kontribusi bagi PDRB Provinsi Riau kurang dari 1 persen. Selama tahun 2012-2016, sumbangan kategori Real Estat hanya sekitar 0,66 persen sampai 0,85 persen. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi kategori ini selama 5 tahun terakhir sangat fluktuatif, sebesar 7,64 persen pada tahun 2012 turun menjadi 6,63 persen dan 5,32 persen pada tahun 2013

dan 2014. Selanjutnya, pada tahun 2015 kembali naik menjadi 8,34 persen, namun pada tahun 2016 kembali turun menjadi 1,52 persen.

4.13 Jasa Perusahaan

Selama 5 tahun terakhir, kontribusi kegiatan ekonomi kategori Jasa Perusahaan sangat kecil dibandingkan peranan kategori-kategori lainnya terhadap perekonomian Riau. Sedangkan laju pertumbuhannya berfluktuatif dari 11,53 persen pada tahun 2012, turun menjadi 8,94 persen pada tahun 2013, dan kembali naik pada tahun 2014 menjadi 12,84 persen. Selanjutnya pada tahun 2015 hingga tahun 2016 terus turun masing-masing sebesar 7,67 persen dan 2,64 persen.

4.14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama 5 tahun terakhir, peranannya relatif stabil, yaitu dengan nilai kontribusi berkisar antara 1,36 persen sampai 1,55 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya cenderung turun dari 6,21 persen pada tahun 2012 menjadi 3,06 persen dan 1,53 persen pada tahun 2013 dan 2014. Bahkan pada tahun 2016, pertumbuhan kategori ini mengalami kontraksi sebesar 0,30 persen.

4.15 Jasa Pendidikan

Pada tahun 2016, kategori Jasa Pendidikan menyumbang sebesar 0,51 persen terhadap total PDRB Riau, mengalami sedikit peningkatan dibandingkan pada tahun 2015 sebesar 0,50 persen. Kontribusi kategori ini pada tahun-tahun sebelumnya hanya sekitar 0,41 persen. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan kategori Jasa Pendidikan mengalami perlambatan dari 6,35 persen pada tahun 2015 menjadi 0,68 persen pada tahun 2016.

4.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Pada tahun 2016, kontribusinya terhadap perekonomian Provinsi Riau sebesar 0,18 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 0,56 persen. Selama tahun 2012-2015 peranannya relatif

stabil, yaitu dengan nilai kontribusi 0,13 persen sampai 0,18 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya di bawah 10 persen.

4.17 Jasa Lainnya

Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Provinsi Riau relatif kecil selama 2012-2014 berturut-turut sebesar 0,30 persen, 0,31 persen, dan 0,34 persen. Kemudian dalam 2 tahun terakhir, kontribusi kategori Jasa Lainnya mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,43 persen pada tahun 2015 dan 0,46 persen pada tahun 2016. Sedangkan laju pertumbuhannya selama 5 tahun terakhir relatif besar, bahkan pada tahun 2014 dan 2015 mencapai dua digit, yaitu 11,14 persen dan 10,14 persen.

<http://riau.bps.go.id>

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2012–2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	106.538.791,4	115.444.555,0	133.550.006,6	145.605.481,6	158.443.506,1
1 Pertanian, Perernakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	75.630.802,3	81.970.530,3	95.209.512,5	100.927.148,3	108.345.007,2
a. Tanaman Pangan	4.093.749,5	4.435.014,9	4.724.991,0	5.329.886,6	6.052.307,8
b. Tanaman Hortikultura	2.292.584,1	2.466.672,1	2.852.417,4	3.382.291,5	3.848.398,1
c. Tanaman Perkebunan	65.407.440,9	70.664.664,2	82.397.249,9	86.163.128,3	91.890.991,1
d. Perernakan	2.889.090,1	3.324.214,3	3.948.628,3	4.698.031,07	5.063.549,0
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	947.937,7	1.079.964,7	1.286.225,8	1.353.810,84	1.489.761,3
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	18.879.458,1	19.359.342,9	21.317.849,0	25.452.234,40	29.444.154,4
3 Perikanan	12.028.531,0	14.114.681,8	17.022.645,1	19.226.098,94	20.654.344,4
B Pertambangan dan Penggalian	235.437.553,6	256.395.342,8	268.819.877,2	199.777.402,0	190.591.019,2
1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	205.862.533,3	224.638.434,1	230.863.367,1	157.815.481,8	147.220.652,2
2 Pertambangan Batubara dan Lignit	4.189.009,8	4.843.434,1	4.941.100,1	1.643.501,7	1.460.606,0
3 Pertambangan Bijih Logam	155.425,8	157.158,1	190.225,1	203.212,0	216.726,6
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	25.230.584,7	26.756.316,6	32.825.184,9	40.115.206,6	41.693.034,4
C Industri Pengolahan	115.048.883,9	124.879.976,6	141.874.675,9	155.685.923,9	168.057.127,1
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	8.279.422,4	10.813.198,8	12.069.106,5	12.897.778,4	13.413.472,7
2 Industri Makanan dan Minuman	83.629.039,1	91.625.902,8	103.724.041,9	114.706.168,4	124.238.728,3
3 Industri Pengolahan Tembakau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	227.470,1	238.060,2	274.624,0	300.374,9	327.311,7
5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	400.757,6	411.507,2	461.567,1	539.776,9	612.149,6
7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	15.198.920,0	14.514.258,0	17.055.841,6	18.233.344,0	20.280.202,1
8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	2.646.868,9	2.781.124,3	3.207.947,6	3.581.004,7	3.789.055,1
9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	3.503.568,1	3.291.794,2	3.701.976,2	3.810.273,0	3.664.722,6
10 Industri Barang Galian bukan Logam	415.857,8	426.458,3	474.921,0	536.680,9	580.929,6
11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	112.116,0	120.078,0	140.248,3	169.001,4	185.302,6
13 Industri Mesin dan Perlengkapan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 Industri Alat Angkutan	80.919,6	81.612,1	93.091,3	110.585,1	112.751,1
15 Industri Furnitur	428.175,8	452.692,4	533.314,9	642.356,3	677.807,6
16 Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	125.768,5	123.290,3	137.995,5	158.579,8	174.694,1

LANJUTAN

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah),2012–2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D Pengadaan Listrik dan Gas	182.186,9	180.354,1	230.368,6	310.742,6	396.111,5
1 Ketenagalistrikan	106.721,3	99.147,4	143.049,0	219.085,0	301.804,0
2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	75.465,6	81.206,8	87.319,6	91.657,6	94.307,5
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	63.383,7	62.198,1	65.787,4	72.056,3	75.556,2
F Konstruksi	34.843.610,0	38.268.199,7	45.437.971,4	51.673.301,3	56.999.522,4
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	37.354.926,8	40.288.998,8	52.868.664,9	57.952.650,7	63.956.777,5
1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	11.401.175,7	12.710.436,5	15.150.219,8	15.733.677,8	17.726.095,3
2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	25.953.751,1	27.578.562,3	37.718.445,1	42.218.972,9	46.230.682,2
H Transportasi dan Pergudangan	3.311.206,3	3.760.843,7	4.457.955,8	5.185.483,2	5.640.182,3
1 Angkutan Rel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Angkutan Darat	1.457.725,6	1.660.900,4	1.968.631,4	2.364.465,8	2.600.926,2
3 Angkutan Laut	1.100.529,4	1.223.477,9	1.448.016,1	1.608.895,5	1.718.219,7
4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	13.323,8	15.613,4	17.996,6	20.385,0	22.661,9
5 Angkutan Udara	500.535,2	593.203,7	712.646,4	837.356,2	915.779,1
6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	239.092,3	267.648,4	310.665,3	354.380,8	382.595,5
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.991.789,0	2.356.064,5	3.163.305,5	3.342.151,1	3.609.923,3
1 Penyediaan Akomodasi	1.540.767,4	1.842.363,3	2.544.391,1	2.596.635,5	2.750.348,7
2 Penyediaan Makan Minum	451.021,6	513.701,2	618.914,4	745.515,7	859.574,6
J Informasi dan Komunikasi	2.990.134,1	3.148.729,4	3.539.376,8	4.077.408,0	4.356.845,4
K Jasa Keuangan dan Asuransi	4.253.648,7	4.925.502,1	5.430.498,1	5.674.547,5	6.154.444,4
1 Jasa Perantara Keuangan	3.798.998,8	4.422.929,2	4.851.184,3	5.043.226,7	5.472.832,0
2 Asuransi dan Dana Pensiun	128.042,0	138.159,1	159.812,8	177.983,4	195.875,3
3 Jasa Keuangan Lainnya	313.203,8	349.680,0	403.733,8	436.800,4	467.656,9
4 Jasa Penunjang Keuangan	13.404,1	14.733,8	15.767,2	16.537,0	18.080,1
L Real Estat	3.694.452,5	4.057.173,3	4.658.529,3	5.404.854,3	5.790.843,5
M,N Jasa Perusahaan	20.592,0	23.423,2	28.439,4	32.290,9	34.512,8
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.282.739,3	8.777.008,2	9.246.790,6	10.076.887,1	10.392.336,6
P Jasa Pendidikan	2.121.224,8	2.271.815,2	2.760.174,8	3.267.186,8	3.459.150,0
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	705.874,1	787.618,7	955.160,4	1.176.038,9	1.233.449,2
R,S,T,U Jasa lainnya	1.651.727,6	1.870.646,4	2.308.276,9	2.824.029,8	3.159.784,3
Produk Domestik Regional Bruto	558.492.724,8	607.498.449,8	679.395.859,6	652.138.436,0	682.351.091,9

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2012–2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	97.910.954,9	102.216.742,9	108.498.089,3	108.969.037,3	113.301.969,5
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	70.294.077,0	74.533.231,4	80.424.325,6	80.417.679,3	84.646.041,9
a. Tanaman Pangan	3.557.039,4	3.633.728,2	3.754.220,9	3.855.466,5	3.973.840,4
b. Tanaman Hortikultura	2.060.475,6	2.081.274,1	2.174.805,3	2.295.271,2	2.452.773,4
c. Tanaman Perkebunan	61.361.036,0	65.270.598,7	70.707.173,2	70.355.294,2	74.218.611,7
d. Peternakan	2.502.451,0	2.687.365,5	2.874.939,6	3.016.102,78	3.066.764,1
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	813.075,0	860.265,0	913.186,5	895.544,61	934.052,2
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	17.343.788,6	16.795.501,9	16.664.224,9	16.565.513,08	16.537.409,9
3 Perikanan	10.273.089,3	10.888.009,5	11.409.538,8	11.985.844,95	12.118.517,7
B Pertambangan dan Penggalian	128.830.869,3	123.107.880,3	116.655.822,9	108.549.184,6	103.972.094,8
1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	100.734.993,6	93.852.436,9	85.802.015,8	79.827.931,0	76.375.619,7
2 Pertambangan Batubara dan Lignit	3.922.547,7	4.298.557,9	4.430.087,6	4.148.500,6	4.270.168,6
3 Pertambangan Bijih Logam	139.535,4	134.971,5	134.982,8	121.463,9	119.985,9
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	24.033.792,6	24.821.914,0	26.288.736,7	27.181.289,1	26.206.320,6
C Industri Pengolahan	108.380.602,4	115.915.838,4	122.442.814,5	126.882.608,4	132.726.294,7
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	10.310.744,4	10.547.871,8	10.786.178,4	10.618.394,3	10.664.542,8
2 Industri Makanan dan Minuman	75.897.676,2	82.917.051,4	87.059.187,2	90.259.046,3	95.780.862,1
3 Industri Pengolahan Tembakau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	207.174,3	224.763,7	232.206,5	238.587,6	237.486,2
5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	367.799,5	387.515,2	420.049,2	428.766,0	434.886,2
7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	14.824.130,3	14.733.261,1	16.158.706,0	16.932.821,8	17.156.675,4
8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	2.434.191,4	2.640.726,1	2.805.765,8	3.155.049,6	3.204.146,7
9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	3.204.862,2	3.270.190,0	3.653.331,4	3.802.885,7	3.813.355,2
10 Industri Barang Galian bukan Logam	381.657,8	401.594,6	414.068,7	452.855,9	473.103,2
11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	110.059,0	117.399,0	121.865,0	131.907,6	137.700,7
13 Industri Mesin dan Perlengkapan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 Industri Alat Angkutan	74.264,8	76.853,9	82.927,0	88.951,2	87.118,0
15 Industri Furnitur	452.617,2	482.801,0	587.729,3	644.869,5	599.869,8
16 Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	115.425,3	115.810,6	120.800,1	128.472,9	136.548,4

LANJUTAN

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2012–2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D Pengadaan Listrik dan Gas	193.986,7	199.837,5	218.628,0	239.829,8	272.247,0
1 Kelenagalistrikan	124.951,5	129.386,8	147.367,0	165.773,0	198.657,0
2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	69.035,2	70.450,7	71.261,0	74.056,8	73.590,0
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	60.171,1	60.558,4	61.197,9	62.674,7	62.395,2
F Konstruksi	29.079.864,7	29.849.808,5	32.374.800,9	34.442.582,7	36.137.431,0
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	34.840.617,8	36.789.162,7	38.245.888,6	38.816.690,8	40.709.270,5
1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	10.210.300,9	10.845.414,7	11.060.568,3	10.760.981,2	11.307.524,7
2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	24.630.317,0	25.943.748,0	27.185.320,3	28.055.709,6	29.401.745,7
H Transportasi dan Pergudangan	3.105.941,9	3.316.025,5	3.581.029,0	3.773.618,3	3.889.186,6
1 Angkutan Rel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Angkutan Darat	1.451.469,3	1.542.930,8	1.640.056,0	1.790.258,5	1.858.837,7
3 Angkutan Laut	995.784,6	1.074.496,9	1.200.235,8	1.203.504,1	1.225.228,7
4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	11.871,6	12.648,7	13.148,1	13.575,8	14.318,5
5 Angkutan Udara	427.285,2	446.561,9	474.700,3	497.882,1	511.050,2
6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	219.531,2	239.387,2	252.888,8	268.397,9	279.751,5
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.752.598,7	1.856.454,6	1.985.851,1	2.023.318,3	2.087.363,8
1 Penyediaan Akomodasi	1.361.577,1	1.437.753,5	1.534.335,0	1.531.293,6	1.559.463,9
2 Penyediaan Makan Minum	391.021,6	418.701,2	451.516,1	492.024,7	527.899,9
J Informasi dan Komunikasi	2.947.576,2	3.269.245,9	3.453.612,0	3.700.665,1	3.883.710,6
K Jasa Keuangan dan Asuransi	3.667.608,8	4.028.079,3	4.226.738,1	4.241.598,1	4.481.269,6
1 Jasa Perantara Keuangan	3.254.904,9	3.582.754,9	3.746.099,4	3.749.592,3	3.967.549,6
2 Asuransi dan Dana Pensiun	114.839,6	121.328,1	131.296,3	138.910,8	147.448,7
3 Jasa Keuangan Lainnya	285.393,9	310.779,0	335.329,8	338.714,1	350.984,9
4 Jasa Penunjang Keuangan	12.470,4	13.217,3	14.012,6	14.380,9	15.286,4
L Real Estat	3.309.557,2	3.528.851,6	3.716.646,0	4.026.522,9	4.087.725,6
M,N Jasa Perusahaan	17.745,0	19.331,3	21.812,8	23.486,5	24.106,1
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.532.398,9	7.762.820,9	7.881.527,6	8.227.912,8	8.202.929,3
P Jasa Pendidikan	1.849.882,5	1.926.725,1	2.040.423,5	2.170.080,9	2.184.906,9
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	634.372,1	688.346,9	746.157,9	820.327,7	824.914,7
R,S,T,U Jasa lainnya	1.511.250,3	1.651.797,7	1.835.742,3	2.021.824,6	2.150.276,9
Produk Domestik Regional Bruto	425.625.998,5	436.187.507,4	447.986.782,5	448.991.963,5	458.998.092,7

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2012–2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19,08	19,00	19,66	22,33	23,22
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	13,54	13,49	14,01	15,48	15,88
a. Tanaman Pangan	0,73	0,73	0,70	0,82	0,89
b. Tanaman Hortikultura	0,41	0,41	0,42	0,52	0,56
c. Tanaman Perkebunan	11,71	11,63	12,13	13,21	13,47
d. Peternakan	0,52	0,55	0,58	0,72	0,74
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,17	0,18	0,19	0,21	0,22
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	3,38	3,19	3,14	3,90	4,32
3 Perikanan	2,15	2,32	2,51	2,95	3,03
B Pertambangan dan Penggalian	42,16	42,21	39,57	30,63	27,93
1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	36,86	36,98	33,98	24,20	21,58
2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,75	0,80	0,73	0,25	0,21
3 Pertambangan Bijih Logam	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	4,52	4,40	4,83	6,15	6,11
C Industri Pengolahan	20,60	20,56	20,88	23,87	24,63
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	1,48	1,78	1,78	1,98	1,97
2 Industri Makanan dan Minuman	14,97	15,08	15,27	17,59	18,21
3 Industri Pengolahan Tembakau	-	-	-	-	-
4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-	-	-
6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0,07	0,07	0,07	0,08	0,09
7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	2,72	2,39	2,51	2,80	2,97
8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,47	0,46	0,47	0,55	0,56
9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,63	0,54	0,54	0,58	0,54
10 Industri Barang Galian bukan Logam	0,07	0,07	0,07	0,08	0,09
11 Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
12 Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
13 Industri Mesin dan Perlengkapan	-	-	-	-	-
14 Industri Alat Angkutan	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
15 Industri Furnitur	0,08	0,07	0,08	0,10	0,10
16 Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03

LANJUTAN

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2012–2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,05	0,06
1 Ketenagalistrikan	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04
2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F Konstruksi	6,24	6,30	6,69	7,92	8,35
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,69	6,63	7,78	8,89	9,37
1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	2,04	2,09	2,23	2,41	2,60
2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	4,65	4,54	5,55	6,47	6,78
H Transportasi dan Pergudangan	0,59	0,62	0,66	0,80	0,83
1 Angkutan Rel	-	-	-	-	-
2 Angkutan Darat	0,26	0,27	0,29	0,36	0,38
3 Angkutan Laut	0,20	0,20	0,21	0,25	0,25
4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Angkutan Udara	0,09	0,10	0,10	0,13	0,13
6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,36	0,39	0,47	0,51	0,53
1 Penyediaan Akomodasi	0,28	0,30	0,37	0,40	0,40
2 Penyediaan Makan Minum	0,08	0,08	0,09	0,11	0,13
J Informasi dan Komunikasi	0,54	0,52	0,52	0,63	0,64
K Jasa Keuangan dan Asuransi	0,76	0,81	0,80	0,87	0,90
1 Jasa Perantara Keuangan	0,68	0,73	0,71	0,77	0,80
2 Asuransi dan Dana Pensiun	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
3 Jasa Keuangan Lainnya	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07
4 Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L Real Estat	0,66	0,67	0,69	0,83	0,85
M,N Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,48	1,44	1,36	1,55	1,52
P Jasa Pendidikan	0,38	0,37	0,41	0,50	0,51
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,13	0,13	0,14	0,18	0,18
R,S,T,U Jasa lainnya	0,30	0,31	0,34	0,43	0,46
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2012–2016

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,00	23,43	24,22	24,27	24,68
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	16,52	17,09	17,95	17,91	18,44
	a. Tanaman Pangan	0,84	0,83	0,84	0,86	0,87
	b. Tanaman Hortikultura	0,48	0,48	0,49	0,51	0,53
	c. Tanaman Perkebunan	14,42	14,96	15,78	15,67	16,17
	d. Peternakan	0,59	0,62	0,64	0,67	0,67
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	4,07	3,85	3,72	3,69	3,60
	3 Perikanan	2,41	2,50	2,55	2,67	2,64
B	Pertambangan dan Penggalian	30,27	28,22	26,04	24,18	22,65
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	23,67	21,52	19,15	17,78	16,64
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,92	0,99	0,99	0,32	0,28
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	5,65	5,69	5,87	6,05	5,71
C	Industri Pengolahan	25,46	26,57	27,33	28,26	28,92
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	2,42	2,42	2,41	2,36	2,32
	2 Industri Makanan dan Minuman	17,83	19,01	19,43	20,10	20,87
	3 Industri Pengolahan Tembakau	-	-	-	-	-
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-	-	-
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0,09	0,09	0,09	0,10	0,09
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	3,48	3,38	3,61	3,77	3,74
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,57	0,61	0,63	0,70	0,70
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,75	0,75	0,82	0,85	0,83
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10
	11 Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
	12 Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan	-	-	-	-	-
	14 Industri Alat Angkutan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	15 Industri Furnitur	0,11	0,11	0,13	0,14	0,13
	16 Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

LANJUTAN

Tabel 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2012–2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06
1 Ketenagalistrikan	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F Konstruksi	6,83	6,84	7,23	7,67	7,87
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,19	8,43	8,54	8,65	8,87
1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	2,40	2,49	2,47	2,40	2,46
2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	5,79	5,95	6,07	6,25	6,41
H Transportasi dan Pergudangan	0,73	0,76	0,80	0,84	0,85
1 Angkutan Rel	-	-	-	-	-
2 Angkutan Darat	0,34	0,35	0,37	0,40	0,40
3 Angkutan Laut	0,23	0,25	0,27	0,27	0,27
4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Angkutan Udara	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11
6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,41	0,43	0,44	0,45	0,45
1 Penyediaan Akomodasi	0,32	0,33	0,34	0,34	0,34
2 Penyediaan Makan Minum	0,09	0,10	0,10	0,11	0,12
J Informasi dan Komunikasi	0,69	0,75	0,77	0,82	0,85
K Jasa Keuangan dan Asuransi	0,86	0,92	0,94	0,94	0,98
1 Jasa Perantara Keuangan	0,76	0,82	0,84	0,84	0,86
2 Asuransi dan Dana Pensiun	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
3 Jasa Keuangan Lainnya	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
4 Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L Real Estat	0,78	0,81	0,83	0,90	0,89
M,N Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,77	1,78	1,76	1,83	1,79
P Jasa Pendidikan	0,43	0,44	0,46	0,48	0,48
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,15	0,16	0,17	0,18	0,18
R,S,T,U Jasa lainnya	0,36	0,38	0,41	0,45	0,47
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2012–2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,01	8,36	15,68	9,03	8,82
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	7,78	8,38	16,15	6,01	7,35
a. Tanaman Pangan	8,91	8,34	6,54	12,80	13,55
b. Tanaman Hortikultura	8,19	7,59	15,64	18,58	13,78
c. Tanaman Perkebunan	7,37	8,04	16,60	4,57	6,65
d. Peternakan	13,95	15,06	18,78	18,98	7,78
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	13,05	13,93	19,10	5,25	10,04
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	(1,38)	2,54	10,12	19,39	15,68
3 Perikanan	17,36	17,34	20,60	12,94	7,43
B Pertambangan dan Penggalian	23,98	8,90	4,85	(25,68)	(4,60)
1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	26,83	9,12	2,77	(31,64)	(6,71)
2 Pertambangan Batubara dan Lignit	20,42	15,62	2,02	(66,74)	(11,13)
3 Pertambangan Bijih Logam	1,37	1,11	21,04	6,83	6,65
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	5,31	6,05	22,68	22,21	3,93
C Industri Pengolahan	7,28	8,55	13,61	9,73	7,95
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	(10,18)	30,60	11,61	6,87	4,00
2 Industri Makanan dan Minuman	14,21	9,56	13,20	10,59	8,31
3 Industri Pengolahan Tembakau	-	-	-	-	-
4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	12,70	4,66	15,36	9,38	8,97
5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-	-	-
6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	9,21	2,68	12,17	16,94	13,41
7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	(12,13)	(4,50)	17,51	6,90	11,23
8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	10,53	5,07	15,35	11,63	5,81
9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	1,31	(6,04)	12,46	2,93	(3,82)
10 Industri Barang Galian bukan Logam	9,42	2,55	11,36	13,00	8,24
11 Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
12 Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	2,48	7,10	16,80	20,50	9,65
13 Industri Mesin dan Perlengkapan	-	-	-	-	-
14 Industri Alat Angkutan	9,64	0,86	14,07	18,79	1,96
15 Industri Furnitur	5,81	5,73	17,81	20,45	5,52
16 Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	8,54	(1,97)	11,93	14,92	10,16

LANJUTAN

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2012–2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,81	(1,01)	27,73	34,89	27,47
1 Ketenagalistrikan	(2,83)	(7,10)	44,28	53,15	37,76
2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	6,43	7,61	7,53	4,97	2,89
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,51	(1,87)	5,77	9,53	4,86
F Konstruksi	13,69	9,83	18,74	13,72	10,31
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,55	7,85	31,22	9,62	10,36
1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	12,35	11,48	19,20	3,85	12,66
2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	14,09	6,26	36,77	11,93	9,50
H Transportasi dan Pergudangan	15,16	13,58	18,54	16,32	8,77
1 Angkutan Rel	-	-	-	-	-
2 Angkutan Darat	11,93	13,94	18,53	20,11	10,00
3 Angkutan Laut	15,88	11,17	18,35	11,11	6,79
4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	17,71	17,18	15,26	13,27	11,17
5 Angkutan Udara	24,99	18,51	20,14	17,50	9,37
6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	13,08	11,94	16,07	14,07	7,96
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	19,30	18,29	34,26	5,65	8,01
1 Penyediaan Akomodasi	19,92	19,57	38,10	2,05	5,92
2 Penyediaan Makan Minum	17,24	13,90	20,48	20,46	15,30
J Informasi dan Komunikasi	16,89	5,30	12,41	15,20	6,85
K Jasa Keuangan dan Asuransi	24,51	15,79	10,25	4,49	8,46
1 Jasa Perantara Keuangan	25,82	16,42	9,68	3,96	8,52
2 Asuransi dan Dana Pensiun	12,36	7,90	15,67	11,37	10,05
3 Jasa Keuangan Lainnya	15,47	11,65	15,46	8,19	7,06
4 Jasa Penunjang Keuangan	13,62	9,92	7,01	4,88	9,33
L Real Estat	11,73	9,82	14,82	16,02	7,14
M,N Jasa Perusahaan	23,62	13,75	21,42	13,54	6,88
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	15,32	5,97	5,35	8,98	3,13
P Jasa Pendidikan	6,18	7,10	21,50	18,37	5,88
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15,33	11,58	21,27	23,12	4,88
R,S,T,U Jasa lainnya	8,35	13,25	23,39	22,34	11,89
Produk Domestik Regional Bruto	15,00	8,77	11,83	(4,01)	4,63

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2012–2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,82	4,40	6,15	0,43	3,98
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	5,62	6,03	7,90	(0,01)	5,26
a. Tanaman Pangan	2,96	2,16	3,32	2,70	3,07
b. Tanaman Hortikultura	2,48	1,01	4,49	5,54	6,86
c. Tanaman Perkebunan	5,88	6,37	8,33	(0,50)	5,49
d. Peternakan	6,81	7,39	6,98	4,91	1,68
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	3,09	5,80	6,15	(1,93)	4,30
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	(5,21)	(3,16)	(0,78)	(0,59)	(0,17)
3 Perikanan	8,62	5,99	4,79	5,05	1,11
B Pertambangan dan Penggalian	(1,43)	(4,44)	(5,24)	(6,95)	(4,22)
1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	(3,09)	(6,83)	(8,58)	(6,96)	(4,32)
2 Pertambangan Batubara dan Lignit	19,06	9,59	3,06	(67,98)	(10,46)
3 Pertambangan Bijih Logam	(9,94)	(3,27)	0,01	(10,02)	(1,22)
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	3,17	3,28	5,91	3,40	(3,59)
C Industri Pengolahan	6,83	6,95	5,63	3,63	4,61
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	2,02	2,30	2,26	(1,56)	0,43
2 Industri Makanan dan Minuman	12,86	9,25	5,00	3,68	6,12
3 Industri Pengolahan Tembakau	-	-	-	-	-
4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	8,09	8,49	3,31	2,75	(0,46)
5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-	-	-
6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	5,54	5,36	8,40	2,08	1,43
7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	(12,56)	(0,61)	9,68	4,79	1,32
8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	(0,18)	8,48	6,25	12,45	1,56
9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	4,36	2,04	11,72	4,09	0,28
10 Industri Barang Galian bukan Logam	5,75	5,22	3,11	9,37	4,47
11 Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
12 Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	1,38	6,67	3,80	8,24	4,39
13 Industri Mesin dan Perlengkapan	-	-	-	-	-
14 Industri Alat Angkutan	7,77	3,49	7,90	7,26	(2,06)
15 Industri Furnitur	1,38	6,67	21,73	9,72	(6,98)
16 Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	4,89	0,33	4,31	6,35	6,29

LANJUTAN

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2012–2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D Pengadaan Listrik dan Gas	5,32	3,02	9,40	9,70	13,52
1 Ketenagalistrikan	7,11	3,55	13,90	12,49	19,84
2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	2,24	2,05	1,15	3,92	(0,63)
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,87	0,64	1,06	2,41	(0,45)
F Konstruksi	3,70	2,65	8,46	6,39	4,92
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,98	5,59	3,96	1,49	4,88
1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	6,00	6,22	1,98	(2,71)	5,08
2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	13,18	5,33	4,79	3,20	4,80
H Transportasi dan Pergudangan	11,19	6,76	7,99	5,38	3,06
1 Angkutan Rel	-	-	-	-	-
2 Angkutan Darat	11,71	6,30	6,29	9,16	3,83
3 Angkutan Laut	11,01	7,90	11,70	0,27	1,81
4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	13,96	6,55	3,95	3,25	5,47
5 Angkutan Udara	10,81	4,51	6,30	4,88	2,64
6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	9,28	9,04	5,64	6,13	4,23
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,36	5,93	6,97	1,89	3,17
1 Penyediaan Akomodasi	10,84	5,59	6,72	(0,20)	1,84
2 Penyediaan Makan Minum	8,73	7,08	7,84	8,97	7,29
J Informasi dan Komunikasi	15,71	10,91	5,64	7,15	4,95
K Jasa Keuangan dan Asuransi	13,45	9,83	4,93	0,35	5,65
1 Jasa Perantara Keuangan	13,89	10,07	4,56	0,09	5,81
2 Asuransi dan Dana Pensiun	9,57	5,65	8,22	5,80	6,15
3 Jasa Keuangan Lainnya	10,33	8,89	7,90	1,01	3,62
4 Jasa Penunjang Keuangan	10,26	5,99	6,02	2,63	6,30
L Real Estat	7,64	6,63	5,32	8,34	1,52
M,N Jasa Perusahaan	11,53	8,94	12,84	7,67	2,64
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,21	3,06	1,53	4,39	(0,30)
P Jasa Pendidikan	4,34	4,15	5,90	6,35	0,68
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,19	8,51	8,40	9,94	0,56
R,S,T,U Jasa lainnya	9,48	9,30	11,14	10,14	6,35
Produk Domestik Regional Bruto	3,76	2,48	2,71	0,22	2,23

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (2010 = 100), 2012–2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	107,01	115,95	134,14	146,25	159,14
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	107,78	116,82	135,69	143,83	154,41
a. Tanaman Pangan	108,91	117,99	125,70	141,80	161,02
b. Tanaman Hortikultura	108,19	116,41	134,61	159,62	181,61
c. Tanaman Perkebunan	107,37	116,00	135,26	141,44	150,85
d. Peternakan	113,95	131,11	155,74	185,30	199,71
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	113,05	128,79	153,39	161,45	177,66
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	98,62	101,13	111,36	132,95	153,81
3 Perikanan	117,36	137,72	166,09	187,59	201,52
B Pertambangan dan Penggalian	123,98	135,01	141,56	105,20	100,36
1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	126,83	138,40	142,23	97,23	90,70
2 Pertambangan Batubara dan Lignit	120,42	139,23	142,04	47,25	41,99
3 Pertambangan Bijih Logam	101,37	102,50	124,06	132,54	141,35
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	105,31	111,68	137,01	167,44	174,02
C Industri Pengolahan	107,28	116,45	132,29	145,17	156,71
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	89,82	117,31	130,93	139,92	145,52
2 Industri Makanan dan Minuman	114,21	125,13	141,66	156,66	169,67
3 Industri Pengolahan Tembakau	-	-	-	-	-
4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	112,70	117,95	136,06	148,82	162,17
5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-	-	-
6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	109,21	112,14	125,78	147,09	166,81
7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	87,87	83,91	98,60	105,41	117,24
8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	110,53	116,14	133,96	149,54	158,23
9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	101,31	95,19	107,05	110,18	105,97
10 Industri Barang Galian bukan Logam	109,42	112,21	124,96	141,21	152,85
11 Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
12 Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	102,48	109,76	128,20	154,48	169,38
13 Industri Mesin dan Perlengkapan	-	-	-	-	-
14 Industri Alat Angkutan	109,64	110,58	126,14	149,84	152,78
15 Industri Furnitur	105,81	111,86	131,79	158,73	167,49
16 Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	108,54	106,40	119,09	136,85	150,76

LANJUTAN

Tabel 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (2010 = 100), 2012–2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D Pengadaan Listrik dan Gas	100,81	99,79	127,47	171,94	219,17
1 Ketenagalistrikan	97,17	90,28	130,25	199,49	274,81
2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	106,43	114,53	123,15	129,27	133,01
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	107,51	105,50	111,59	122,23	128,16
F Konstruksi	113,69	124,87	148,26	168,61	185,99
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	113,55	122,47	160,71	176,17	194,42
1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	112,35	125,25	149,29	155,04	174,67
2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	114,09	121,24	165,81	185,60	203,23
H Transportasi dan Pergudangan	115,16	130,80	155,04	180,35	196,16
1 Angkutan Rel	-	-	-	-	-
2 Angkutan Darat	111,93	127,53	151,16	181,55	199,71
3 Angkutan Laut	115,88	128,83	152,47	169,41	180,92
4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	117,71	137,94	158,99	180,09	200,20
5 Angkutan Udara	124,99	148,13	177,95	209,09	228,67
6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	113,08	126,59	146,93	167,61	180,96
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	119,30	141,12	189,47	200,18	216,22
1 Penyediaan Akomodasi	119,92	143,39	198,03	202,09	214,05
2 Penyediaan Makan Minum	117,24	133,54	160,89	193,80	223,45
J Informasi dan Komunikasi	116,89	123,08	138,36	159,39	170,31
K Jasa Keuangan dan Asuransi	124,51	144,17	158,96	166,10	180,15
1 Jasa Perantara Keuangan	125,82	146,49	160,67	167,03	181,26
2 Asuransi dan Dana Pensiun	112,36	121,24	140,24	156,19	171,89
3 Jasa Keuangan Lainnya	115,47	128,92	148,84	161,03	172,41
4 Jasa Penunjang Keuangan	113,62	124,89	133,65	140,18	153,26
L Real Estat	111,73	122,70	140,88	163,45	175,13
M,N Jasa Perusahaan	123,62	140,62	170,73	193,85	207,19
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	115,32	122,20	128,74	140,30	144,69
P Jasa Pendidikan	106,18	113,72	138,17	163,55	173,16
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	115,33	128,68	156,06	192,15	201,53
R,S,T,U Jasa lainnya	108,35	122,71	151,41	185,24	207,27
Produk Domestik Regional Bruto	115,00	125,09	139,89	134,28	140,50

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2012–2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	103,82	108,39	115,05	115,55	120,14
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	105,62	111,99	120,84	120,83	127,19
a. Tanaman Pangan	102,96	105,18	108,66	111,60	115,02
b. Tanaman Hortikultura	102,48	103,52	108,17	114,16	121,99
c. Tanaman Perkebunan	105,88	112,62	122,00	121,40	128,06
d. Peternakan	106,81	114,70	122,71	128,73	130,90
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	103,09	109,07	115,78	113,54	118,42
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	94,79	91,79	91,07	90,53	90,38
3 Perikanan	108,62	115,12	120,64	126,73	128,13
B Pertambangan dan Penggalian	98,57	94,19	89,26	83,06	79,55
1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	96,91	90,29	82,54	76,79	73,47
2 Pertambangan Batubara dan Lignit	119,06	130,47	134,47	43,06	38,55
3 Pertambangan Bijih Logam	90,06	87,11	87,12	78,40	77,44
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	103,17	106,55	112,85	116,68	112,49
C Industri Pengolahan	106,83	114,26	120,69	125,07	130,83
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	102,02	104,37	106,72	105,06	105,52
2 Industri Makanan dan Minuman	112,86	123,30	129,46	134,22	142,43
3 Industri Pengolahan Tembakau	-	-	-	-	-
4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	108,09	117,27	121,15	124,48	123,91
5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-	-	-
6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	105,54	111,20	120,54	123,04	124,79
7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	87,44	86,91	95,31	99,88	101,20
8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	99,82	108,29	115,06	129,38	131,40
9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	104,36	106,49	118,96	123,83	124,17
10 Industri Barang Galian bukan Logam	105,75	111,27	114,73	125,47	131,08
11 Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
12 Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	101,38	108,14	112,26	121,51	126,85
13 Industri Mesin dan Perlengkapan	-	-	-	-	-
14 Industri Alat Angkutan	107,77	111,53	120,34	129,08	126,42
15 Industri Furnitur	101,38	108,14	131,65	144,45	134,37
16 Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	104,89	105,24	109,78	116,75	124,09

LANJUTAN

Tabel 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2012–2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D Pengadaan Listrik dan Gas	105,32	108,50	118,70	130,21	147,81
1 Ketenagalistrikan	107,11	110,91	126,32	142,10	170,29
2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	102,24	104,33	105,53	109,67	108,98
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	100,87	101,52	102,59	105,06	104,59
F Konstruksi	103,70	106,44	115,45	122,82	128,86
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	110,98	117,18	121,82	123,64	129,67
1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	106,00	112,60	114,83	111,72	117,39
2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	113,18	119,21	124,92	128,92	135,10
H Transportasi dan Pergudangan	111,19	118,71	128,20	135,10	139,23
1 Angkutan Rel	-	-	-	-	-
2 Angkutan Darat	111,71	118,75	126,22	137,78	143,06
3 Angkutan Laut	111,01	119,78	133,80	134,16	136,58
4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	113,96	121,42	126,21	130,32	137,45
5 Angkutan Udara	110,81	115,81	123,11	129,12	132,53
6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	109,28	119,17	125,89	133,61	139,26
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	110,36	116,90	125,05	127,41	131,44
1 Penyediaan Akomodasi	110,84	117,04	124,90	124,66	126,95
2 Penyediaan Makan Minum	108,73	116,43	125,56	136,82	146,80
J Informasi dan Komunikasi	115,71	128,34	135,58	145,28	152,46
K Jasa Keuangan dan Asuransi	113,45	124,60	130,75	131,21	138,62
1 Jasa Perantara Keuangan	113,89	125,36	131,08	131,20	138,83
2 Asuransi dan Dana Pensiun	109,57	115,76	125,28	132,54	140,69
3 Jasa Keuangan Lainnya	110,33	120,14	129,64	130,94	135,69
4 Jasa Penunjang Keuangan	110,26	116,86	123,90	127,15	135,16
L Real Estat	107,64	114,78	120,88	130,96	132,95
M,N Jasa Perusahaan	111,53	121,50	137,10	147,62	151,51
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	106,21	109,46	111,14	116,02	115,67
P Jasa Pendidikan	104,34	108,67	115,08	122,40	123,23
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	109,19	118,47	128,43	141,19	141,98
R,S,T,U Jasa lainnya	109,48	119,66	132,99	146,47	155,77
Produk Domestik Regional Bruto	103,76	106,33	109,21	109,45	111,89

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 9. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Menurut Lapangan Usaha (2010 = 100), 2012–2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	108,81	112,94	123,09	133,62	139,84
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	107,59	109,98	118,38	125,50	128,00
a. Tanaman Pangan	115,09	122,05	125,86	138,24	152,30
b. Tanaman Hortikultura	111,26	118,52	131,16	147,36	156,90
c. Tanaman Perkebunan	106,59	108,26	116,53	122,47	123,81
d. Peternakan	115,45	123,70	137,35	155,76	165,11
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	116,59	125,54	140,85	151,17	159,49
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	108,85	115,27	127,93	153,65	178,05
3 Perikanan	117,09	129,64	149,20	160,41	170,44
B Pertambangan dan Penggalian	182,75	208,27	230,44	184,04	183,31
1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	204,36	239,35	269,07	197,69	192,76
2 Pertambangan Batubara dan Lignit	106,79	112,68	111,54	115,86	114,99
3 Pertambangan Bijih Logam	111,39	116,44	140,93	167,30	180,63
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	104,98	107,79	124,86	147,58	159,10
C Industri Pengolahan	106,15	107,73	115,87	122,70	126,62
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	80,30	102,52	111,89	121,47	125,78
2 Industri Makanan dan Minuman	110,19	110,50	119,14	127,09	129,71
3 Industri Pengolahan Tembakau					
4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	109,80	105,92	118,27	125,90	137,82
5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki					
6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	108,96	106,19	109,88	125,89	140,76
7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	102,53	98,51	105,55	107,68	118,21
8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	108,74	105,32	114,33	113,50	118,25
9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	109,32	100,66	101,33	100,19	96,10
10 Industri Barang Galian bukan Logam	108,96	106,19	114,70	118,51	122,79
11 Industri Logam Dasar					
12 Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	101,87	102,28	115,09	128,12	134,57
13 Industri Mesin dan Perlengkapan					
14 Industri Alat Angkutan	108,96	106,19	112,26	124,32	129,42
15 Industri Furnitur	94,60	93,76	90,74	99,61	112,99
16 Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	108,96	106,46	114,23	123,43	127,94

LANJUTAN

Tabel 9. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Menurut Lapangan Usaha (2010 = 100), 2012–2016

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	93,92	90,25	105,37	129,57	145,50
	1 Ketenagalistrikan	85,41	76,63	97,07	132,16	151,92
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	109,31	115,27	122,53	123,77	128,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	105,34	102,71	107,50	114,97	121,09
F	Konstruksi	119,82	128,20	140,35	150,03	157,73
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	107,22	109,51	138,23	149,30	157,11
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	111,66	117,20	136,98	146,21	156,76
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	105,37	106,30	138,75	150,48	157,24
H	Transportasi dan Pergudangan	106,61	113,41	124,49	137,41	145,02
	1 Angkutan Rel					
	2 Angkutan Darat	100,43	107,65	120,03	132,07	139,92
	3 Angkutan Laut	110,52	113,87	120,64	133,68	140,24
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	112,23	123,44	136,88	150,16	158,27
	5 Angkutan Udara	117,14	132,84	150,13	168,18	179,20
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	108,91	111,81	122,85	132,04	136,76
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	113,65	126,91	159,29	165,18	172,94
	1 Penyediaan Akomodasi	113,16	128,14	165,83	169,57	176,37
	2 Penyediaan Makan Minum	115,34	122,69	137,07	151,52	162,83
J	Informasi dan Komunikasi	101,44	96,31	102,48	110,18	112,18
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	115,98	122,28	128,48	133,78	137,34
	1 Jasa Perantara Keuangan	116,72	123,45	129,50	134,50	137,94
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	111,50	113,87	121,72	128,13	132,84
	3 Jasa Keuangan Lainnya	109,74	112,52	120,40	128,96	133,24
	4 Jasa Penunjang Keuangan	107,49	111,47	112,52	114,99	118,28
L	Real Estat	111,63	114,97	125,34	134,23	141,66
M,N	Jasa Perusahaan	116,04	121,17	130,38	137,49	143,17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	109,96	113,06	117,32	122,47	126,69
P	Jasa Pendidikan	114,67	117,91	135,27	150,56	158,32
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	111,27	114,42	128,01	143,36	149,52
R,S,T,U	Jasa lainnya	109,30	113,25	125,74	139,68	146,95
Produk Domestik Regional Bruto		131,22	139,27	151,66	145,25	148,66

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Menurut Lapangan Usaha (persen), 2012–2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,07	3,79	8,99	8,56	4,66
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	2,05	2,22	7,64	6,01	1,99
a. Tanaman Pangan	5,78	6,05	3,12	9,84	10,17
b. Tanaman Hortikultura	5,57	6,52	10,67	12,35	6,47
c. Tanaman Perkebunan	1,41	1,57	7,64	5,09	1,10
d. Peternakan	6,68	7,14	11,03	13,41	6,00
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	9,66	7,68	12,20	7,33	5,51
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	4,04	5,89	10,98	20,11	15,88
3 Perikanan	8,05	10,72	15,09	7,51	6,25
B Pertambangan dan Penggalian	25,77	13,96	10,64	(20,13)	(0,40)
1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	30,88	17,12	12,41	(26,53)	(2,50)
2 Pertambangan Batubara dan Lignit	1,14	5,51	(1,01)	3,88	(0,75)
3 Pertambangan Bijih Logam	12,56	4,53	21,03	18,72	7,96
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	2,08	2,68	15,84	18,20	7,80
C Industri Pengolahan	0,42	1,49	7,55	5,90	3,19
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	(11,96)	27,67	9,15	8,55	3,55
2 Industri Makanan dan Minuman	1,20	0,29	7,82	6,67	2,07
3 Industri Pengolahan Tembakau	-	-	-	-	-
4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	4,27	(3,53)	11,66	6,45	9,47
5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-	-	-
6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	3,47	(2,54)	3,48	14,57	11,81
7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,49	(3,92)	7,14	2,02	9,77
8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	10,73	(3,15)	8,56	(0,73)	4,19
9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	(2,92)	(7,92)	0,67	(1,12)	(4,08)
10 Industri Barang Galian bukan Logam	3,47	(2,54)	8,01	3,33	3,61
11 Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
12 Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	1,08	0,41	12,52	11,33	5,03
13 Industri Mesin dan Perlengkapan	-	-	-	-	-
14 Industri Alat Angkutan	1,74	(2,54)	5,71	10,75	4,10
15 Industri Furnitur	4,36	(0,88)	(3,22)	9,77	13,43
16 Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	3,47	(2,30)	7,30	8,05	3,65

LANJUTAN

Tabel 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Menurut Lapangan Usaha (persen), 2012–2016

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	(4,29)	(3,90)	16,75	22,96	12,29
	1 Ketenagalistrikan	(9,28)	(10,28)	26,68	36,15	14,95
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	4,10	5,45	6,30	1,01	3,54
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,59	(2,50)	4,67	6,95	5,33
F	Konstruksi	9,64	7,00	9,48	6,90	5,13
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,32	2,14	26,23	8,00	5,23
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	5,99	4,96	16,88	6,74	7,22
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	0,81	0,88	30,52	8,46	4,49
H	Transportasi dan Pergudangan	3,57	6,38	9,76	10,38	5,54
	1 Angkutan Rel	-	-	-	-	-
	2 Angkutan Darat	0,20	7,18	11,51	10,03	5,94
	3 Angkutan Laut	4,39	3,03	5,95	10,81	4,90
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	3,29	9,98	10,89	9,70	5,40
	5 Angkutan Udara	12,79	13,40	13,01	12,03	6,55
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	3,48	2,66	9,88	7,48	3,58
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,10	11,67	25,51	3,70	4,70
	1 Penyediaan Akomodasi	8,19	13,24	29,41	2,26	4,01
	2 Penyediaan Makan Minum	7,82	6,37	11,73	10,54	7,46
J	Informasi dan Komunikasi	1,01	(5,06)	6,41	7,51	1,82
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,74	5,43	5,07	4,13	2,66
	1 Jasa Perantara Keuangan	10,48	5,77	4,90	3,86	2,56
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	2,55	2,13	6,89	5,27	3,68
	3 Jasa Keuangan Lainnya	4,66	2,53	7,00	7,11	3,32
	4 Jasa Penunjang Keuangan	3,05	3,71	0,94	2,20	2,85
L	Real Estat	3,79	2,99	9,02	7,09	5,54
M,N	Jasa Perusahaan	10,84	4,41	7,60	5,45	4,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,57	2,82	3,77	4,39	3,44
P	Jasa Pendidikan	1,77	2,83	14,73	11,30	5,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,63	2,83	11,88	11,99	4,30
R,S,T,U	Jasa lainnya	(1,04)	3,62	11,03	11,08	5,21
Produk Domestik Regional Bruto		10,84	6,14	8,89	(4,23)	2,35

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

<http://riau.bps.go.id>



DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://riau.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI RIAU**

Jl. Pattimura No. 12 Pekanbaru 28131
Telp. (0761) 23042, fax. (0761) 21336

homepage: <http://riau.bps.go.id> email: bps1400@bps.go.id